

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun oleh :
BAHRUN ASSIDIQI
10412141034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012**

Oleh:

BAHRUN ASSIDIQI

10412141034

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012 dan mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012

Setelah melakukan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 12,13%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,03% (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum rasio efektifitas rata-rata 103,82% dan rasio efisiensi rata-rata 12,33%, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0,23%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, APBD

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

BAHRUN ASSIDIQI

10412141034

Telah diseminarkan oleh

Nara Sumber Skripsi Program Studi Akuntansi

Pada tanggal 17 Januari 2014

Disetujui,

Dosen Pembimbing



Abdullah Taman, M.Si. Ak
NIP. 19630624-199901 1 001



Wakil Dekan I

Prof. Dr. Moerdiyanto, M.Pd., MM.
NIP. 19580507 198303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012**

yang disusun oleh:

BAHRUN ASSIDIQI
NIM. 10412141034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 April 2014 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Sukirno, Ph.D	Ketua Penguji		15/4/2014
Abdullah Taman, M.Si., Akt	Sekretaris		13/4/2014
Moh. Djazari, M.Pd	Penguji Utama		13/4/2014

Yogyakarta, 6 Mei 2014

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharto, M.Si
NIP. 19550328 198303 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahrún Assidiqi

NIM : 10412141034

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008-2012

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 02 April 2014

Peneliti

Bahrún Assidiqi
NIM. 10412141034

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujaadilah: 11)

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.” (HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SwT., karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

- ✓ Bapak dan Ibu, yang telah memberikan dukungan, perhatian, semangat dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SwT., atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012” dengan lancar. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Sukirno, Ph.D., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi.
4. Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Amanita Novi Y, M.Si., Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama peneliti menuntut ilmu.
6. Abdullah Taman, M.Si., Ak., Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
7. Moh. Djazari, M.Pd., Dosen Narasumber yang telah memberikan saran dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi.

8. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman selama peneliti menuntut ilmu.
9. Teman-teman Histasia (Histeria Akuntansi A) yang telah menemani selama kuliah dan telah memberikan semangat dan doa.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Peneliti hanya manusia biasa yang masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kekurangan dalam penelitian ini peneliti memohon maaf. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Maret 2014
Peneliti

Bahrin Assidiqi
10412141034

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN.....	8
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Kinerja Keuangan.....	8
2. Anggaran Pendapatan Daerah.....	11
3. Anggaran Belanja Daerah.....	15
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	15
5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
B. Penelitian yang Relevan.....	24
C. Kerangka Berpikir.....	26
D. Paradigma Penelitian.....	28

E. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Desain Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah	32
2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Data Umum.....	38
2. Data Khusus	44
B. Perhitungan dan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012	49
1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.....	49
2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012	62
C. Pembahasan.....	87
1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapaten Daerah	88
2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah	91
D. Jawaban Pertanyaan Penelitian	94
E. Keterbatasan Penelitian.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Klaten.....	39
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.....	41
3. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah)	45
4. Realisasi APBD Kabupaten Klaten 2008-2012 (dalam Rupiah)	45
5. Realisasi Pos-pos Pembentuk Pendapatan Daerah (dalam Rupiah).....	46
6. Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD Kabupaten Klaten (dalam Rupiah).....	46
7. Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Biaya Pemerolehan Pajak Daerah (dalam Rupiah)	47
8. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal (dalam Rupiah)	48
9. Analisis Varians Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)	50
10. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah).....	51
11. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah).....	52
12. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	53
13. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah).....	54
14. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah).....	55

15. Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah).....	56
16. Derajat Desentralisasi (dalam Rupiah)	57
17. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam Rupiah)	58
18. Rasio Efektifitas Pajak Daerah (dalam Rupiah).....	59
19. Rasio Efisiensi Pajak Daerah (dalam Rupiah)	60
20. Derajat Kontribusi BUMD (dalam Rupiah).....	61
21. Analisis Varians Belanja Daerah (dalam Rupiah)	62
22. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah) ..	64
23. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah) ..	65
24. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah) ..	66
25. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah) ..	67
26. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah) ..	68
27. Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah).....	69
28. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah)	70
29. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah)	71
30. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah)	72
31. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah)	73
32. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah)	74
33. Analisis Trend Keserasian Belanja Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah).....	75
34. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah).....	77

35. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah).....	79
36. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah).....	81
37. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah).....	83
38. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah).....	85
39. Analisis Trend Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah).....	86
40. Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	28
2. Peta Kabupaten Klaten.....	39
3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.....	106
2. Perhitungan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang

menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kabupaten Klaten adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Hal ini ditunjukkan membengkaknya anggaran untuk pegawai. Pada tahun 2011 anggaran untuk belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Klaten mencapai 70% dari total belanja tahun 2011 (sumber: www.solopos.com). Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintahan Kabupaten Klaten. Ditambah lagi Kabupaten Klaten masih menggunakan *incremental budget* dalam penyusunan APBD, sementara itu cara seperti ini sudah sedikit ketinggalan zaman dan mungkin tidak relevan lagi dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tuntutan pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan karena sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih buruk dalam Kinerja Keuangan.
2. Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran
3. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan masih kurang pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah, padahal lembaga komersial telah menerapkan dan memanfaatkan analisis Kinerja Keuangan sebagai cara evaluasi kinerja perusahaan.
4. Para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta menginterpretasikan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga perlu analisis Kinerja Keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan Laporan Realisasi Anggaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten. Periode yang dilakukan adalah tahun 2008-2012. Penelitian ini mengambil data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten, serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini mengambil data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten periode 2008-2012 sebagai sumber analisis mengenai Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2008-2012.
2. Mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2008-2012.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teoritis

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan 2006:239). Menurut Nurlan Darise (2008:51) Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan definisi Kinerja Keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat” Hendro Sumarjo dalam Tyas Nurulafifah (2012). Menurut Abdul Halim (2007) Kinerja Keuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan

salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatann atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006: 239) berkaitan dengan pengukuran Kinerja Keuangan mengandung beberapa tujuan :

- 1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Berdasarkan tujuan pengukuran Kinerja Keuangan yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran Kinerja Keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan Kinerja Keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi Kinerja Keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Wayne C. Parker (1996:3) dalam Arta Sadjiarto (2000) menyebutkan lima manfaat dilakukannya pengukuran Kinerja Keuangan, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran Kinerja Keuangan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran Kinerja Keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada.

- 2) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas internal.

Adanya pengukuran Kinerja Keuangan ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

- 3) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi Kinerja Keuangan organisasi kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran Kinerja Keuangan yang baik.

- 4) Pengukuran Kinerja Keuangan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur Kinerja Keuangan dan kemampuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai objektif.

- 5) Pengukuran Kinerja Keuangan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

Berdasarkan manfaat pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah di atas, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

2. Anggaran Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Menurut Nurlan Darise (2008) Pendapatan Daerah digolongkan menjadi tiga :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

(BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup: hibah/ bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

3. Anggaran Belanja Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:50) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja Daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Belanja Aparatur Daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.
- b. Belanja Pelayanan Publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Manurut Nurlan Darise (2008:133) Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu :

a. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara :

1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan

harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variansce*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variansce*). Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Berikut ini rumus untuk Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah:

Pertumbuhan Pendapatan Tahun t =

$$\frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t - 1)}{\text{Pend. Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

atau pemerintah propinsi. Berikut ini rumus untuk menghitung

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah :

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat menghitung Rasio Efisiensi Pajak Daerah diperlukan data tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah:

Rasio Efektifitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisaasi Pend. Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah =

$$= \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

d) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung Pendapatan Daerah. Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Kontribusi BUMD:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Pend. Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai dan 2) selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan

sebaliknya, ini terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah

Pertumbuhan Belanja Tahun t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}_t - \text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

3) Analisis Keresasian Belanja Daerah

Analisis Keresasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keresasian Belanja Daerah antara lain berupa :

a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi

adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

B. Penelitian yang Relevan

1. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010” yang dilakukan oleh Tyas Nurulafifah (2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Sleman dilihat dari Analisis Varians Dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat dikatakan baik, sedangkan dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Pemkab Sleman dikatakan rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, Pemkab Sleman sangat efektif dan efisien dalam mengelola pajak daerah, Rasio Derajat Kontribusi Bank Pasar dan Bank BPD menunjukkan angka yang rendah. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemkab Sleman dilihat dari Analisis Varians Dan Pertumbuhan Daerah dapat dikatakan baik, dari Analisis Keserasian Belanja Daerah dapat

dikatakan Pemkab Sleman mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal, dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Pemkab Sleman tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Kinerja keuangan pembiayaan daerah Pemkab Sleman adalah kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Perbedaan mencolok penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian ini mengukur juga kinerja pembiayaan daerah sedangkan di penelitian sekarang hanya mengukur Kinerja Keuangan dari Pendapatan Dan Belanja Daerah. Perbedaan yang lain adalah tempat penelitian yang mengambil Kabupaten Sleman, sedangkan untuk penelitian yang sekarang mengambil Kabupaten Klaten.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Mhd Karya Satya Azhar (2008)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal, upaya fiskal, kemampuan pembiayaan, dan efisiensi penggunaan anggaran pada era sebelum dan setelah otonomi daerah. Penelitian ini dapat dikatakan mendukung hasil dari penelitian Abdul Halim dan Izzah Marfhuah, dimana penelitian tersebut menunjukkan terdapat perbedaan Kinerja Keuangan

sebelum dan setelah otonomi. Perbedaan ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembiayaan daerah dari pemerintahan pusat cukup tinggi dan tekanan keuangan yang mengakibatkan kinerja pemerintahan daerah bergeser naik maupun turun. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian ini memfokuskan pada hasil Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah, jadi terdapat otonomi daerah sebagai fokus utama. Penelitian ini juga membandingkan bagaimana Kinerja Keuangan suatu daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

C. Kerangka Berpikir

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka Kinerja Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pengukuran Kinerja Keuangan adalah mengevaluasi Kinerja Keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan.

Melihat keadaan dan masalah yang ada maka pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend (pertumbuhan) dan analisis rasio.

Analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dapat dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan yang meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Melihat Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Belanja Daerah, maka dapat dinilai Kinerja Keuangan APBD secara umum, jika semua Kinerja Keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Keuangan APBD adalah baik.

D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paradigma yang telah disampaikan di atas ditarik pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Bagaimana Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
2. Bagaimana Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
3. Bagaimana Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
4. Bagaimana Varians Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
5. Bagaimana Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
6. Bagaimana Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?
7. Bagaimana Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Suharsimi (2002), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan mengambil data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pengambilan data di tempat yang tertera di atas dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2014

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten tahun 2008-2012

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan entitas pada suatu periode tertentu dan diukur dengan indikator tertentu yang disusun berdasarkan basis akrual guna mengukur suatu keberhasilan entitas. Gambaran ini akan menunjukkan bagaimana tingkat efektif, efisien dan ekonomis suatu entitas dalam melakukan beberapa aktivitas yang ada pada entitas tersebut.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kinerja Keuangan Daerah dapat terlihat dari dua hal utama, hal tersebut berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran, sering juga disebut pendapatan dan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dikelola dalam APBD. Jadi APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan pencarian data

sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan dokumentasi. Data diperoleh dari kantor BAPPEDA Kabupaten Klaten berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2008-2012 dan data biaya pemungutan pajak tahun 2008-2012 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran dapat dilakukan Analisis Pendapatan Daerah dengan cara :

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010).

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Pertumbuhan secara positif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Pertumbuhan Pend. Tahun } t = \frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t - 1)}{\text{Pend. Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Menurut artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011), jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50%. menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2010). Menurut Kementerian Keuangan (2011), jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio Efektivitas Pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, sedang Rasio Efisiensi Pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Data biaya pemungutan pajak dapat diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pend. Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

4) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Pend. Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara :

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis Varians Belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010).

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendalai pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

Pertumbuhan Belanja Tahun t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}_t - \text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah merupakan analisis di mana titik fokus analisis berada pada 3 fungsi utama anggaran, yaitu sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis Keserasian Belanja Daerah meliputi:

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun

anggaran. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi Total Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio dalam Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak diantara $7^{\circ}32'19''$ sampai dengan $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}26'14''$ sampai dengan $110^{\circ}47'51''$ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Jika dilihat dari ketinggian air laut, maka terdapat 3,72% terletak di antara ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan air laut, 83,52% terletak di antara ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan air laut dan 12,76% terletak di antara ketinggian 500 - 2500 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Klaten berada di antara dua kota besar yaitu Surakarta dan Yogyakarta membuat Kabupaten Klaten memiliki hal yang istimewa. Adanya jalan raya yang menghubungkan dua kota besar tersebut menambah strategis Kabupaten Klaten.



Gambar 2. Peta Kabupaten Klaten

b. Wilayah Administrasi

Secara Administrasi, Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 9.553 RT, naik sebesar 0,10% bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan Rukun Warga (RW) sebanyak 3.700 RW naik sebesar 0,71% bila dibandingkan dengan tahun 2011.

Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Luas wilayah (Km ²)
1	Prambanan	16	183	24,43
2	Gantiwarno	16	149	25,64
3	Wedi	19	178	24,38
4	Bayat	18	228	39,43
5	Cawas	20	238	34,47
6	Trucuk	18	171	33,81

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Luas wilayah (Km ²)
7	Kalikotes	7	99	12,98
8	Kebonarum	7	65	9,67
9	Jogonalan	18	202	26,70
10	Manisrenggo	16	252	26,96
11	Karangnongko	14	35	26,74
12	Ngawen	13	124	16,97
13	Ceper	18	42	24,45
14	Pedan	14	151	19,17
15	Karangdowo	19	161	29,23
16	Juwiring	19	208	29,79
17	Wonosari	18	149	31,14
18	Delanggu	16	37	18,78
19	Polanharjo	18	44	23,84
20	Karanganom	19	48	24,06
21	Tulung	18	185	32
22	Jatinom	17	207	35,53
23	Kemalang	13	214	51,66
24	Klaten Selatan	11	112	14,43
25	Klaten Tengah	3	97	8,92
26	Klaten Utara	6	124	10,38
Jumlah		391	3.703	655,56

Sumber: BPS (2011)

c. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2012 sebesar 1.313.914 jiwa, naik sebesar 2.895 jiwa atau 0,22% apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Kenaikan penduduk ini, menyebabkan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 2.004 per kilo meter persegi. Apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki – laki sebesar 644.362 jiwa, naik sebesar 0,31%, sedangkan perempuan sebesar 669.552 jiwa, naik sebesar 0,14% bila dibandingkan dengan tahun 2011. Apabila dilihat dari kelompok umur, maka kelompok umur di atas 65 tahun sebesar 130.701 jiwa mendominasi penduduk Kabupaten Klaten. Jumlah Kepala Keluarga

tahun 2011 sebesar 382.966 Kepala Keluarga. Kepadatan ini menyebabkan rata-rata jiwa per keluarga sebesar 3,42 orang per keluarga.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Prambanan	49.277	49.538	49.393	49.637	49.977
2	Gantiwarno	40.994	41.102	41.111	41.172	41.306
3	Wedi	55.516	55.983	56.025	55.874	55.904
4	Bayat	63.852	64.027	64.214	64.253	64.231
5	Cawas	66.132	66.093	66.196	66.152	66.071
6	Trucuk	82.291	82.558	82.778	83.237	83.817
7	Kalikotes	37.389	37.597	38.003	38.207	38.471
8	Kebonarum	21.343	21.429	21.496	21.558	21.541
9	Jogonalan	57.877	58.115	58.402	58.692	58.825
10	Manisrenggo	41.766	41.962	42.210	42.354	42.463
11	Karangnongko	38.157	37.995	37.912	37.972	37.899
12	Ngawen	44.420	44.560	44.825	45.012	45.068
13	Ceper	63.835	63.830	63.985	63.953	63.961
14	Pedan	48.862	48.802	48.989	49.003	49.117
15	Karangdowo	51.020	51.018	51.077	51.144	51.120
16	Juwiring	61.216	61.300	61.348	61.208	61.110
17	Wonosari	62.663	62.801	62.859	62.973	63.177
18	Delanggu	44.516	44.760	44.889	44.958	44.949
19	Polanharjo	46.047	46.087	46.305	46.356	46.542
20	Karanganom	49.080	49.152	49.245	49.150	49.239
21	Tulung	54.576	54.551	54.708	54.723	54.888
22	Jatinom	57.338	57.438	57.592	58.509	58.593
23	Kemalang	34.681	34.940	35.106	35.442	35.656
24	Klaten Selatan	41.527	41.880	42.204	42.438	42.724
25	Klaten Tengah	43.878	43.877	44.045	44.168	44.152
26	Klaten Utara	42.241	42.515	42.645	42.874	43.113
Jumlah		1.300.494	1.303.910	1.307.562	1.311.019	1.313.914

Sumber: BPS (2011)

d. Kondisi Sosial

1) Pendidikan

Pada tahun 2011 jumlah murid TK di Kabupaten Klaten selama tahun 2011 sebanyak 30.240 siswa. Angka ini terjadi

kenaikan sebesar 0,68% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah guru TK yang tercatat pada tahun 2011 sebanyak 2.607 orang, angka ini mengalami penurunan sebesar 7,29% dari tahun 2010. Dari data BPS pada tahun 2011 tercatat jumlah murid SD sebanyak 115.299 orang, sedangkan untuk SMP sebanyak 50.437 siswa dan untuk SMA atau sederajat sebanyak 41.648 siswa.

Pada tahun 2011 terjadi angka putus sekolah yang cukup tinggi dan paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat 185 anak yang putus sekolah pada tahun 2011, 171 anak untuk tahun 2010, 144 anak untuk tahun 2009, dan 141 anak untuk tahun 2008. Angka putus sekolah jika dilihat dari jenjang pendidikan, paling besar siswa yang putus sekolah adalah tingkat SD.

2) Kesehatan

Jumlah penduduk yang cukup banyak membuat Kabupaten Klaten memerlukan jumlah fasilitas kesehatan yang banyak juga. Tercatat untuk menjaga penduduk agar terlayani dalam sektor kesehatan, Kabupaten Klaten memiliki beberapa fasilitas kesehatan antara lain :

- a) 9 unit rumah sakit swasta
- b) 4 unit rumah sakit umum
- c) 1 unit rumah sakit jiwa

Jumlah dokter praktek swasta pada tahun 2011 sebesar 391 buah, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Klaten Utara. Tenaga bidan yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun 2011 tercatat sebanyak 311 orang.

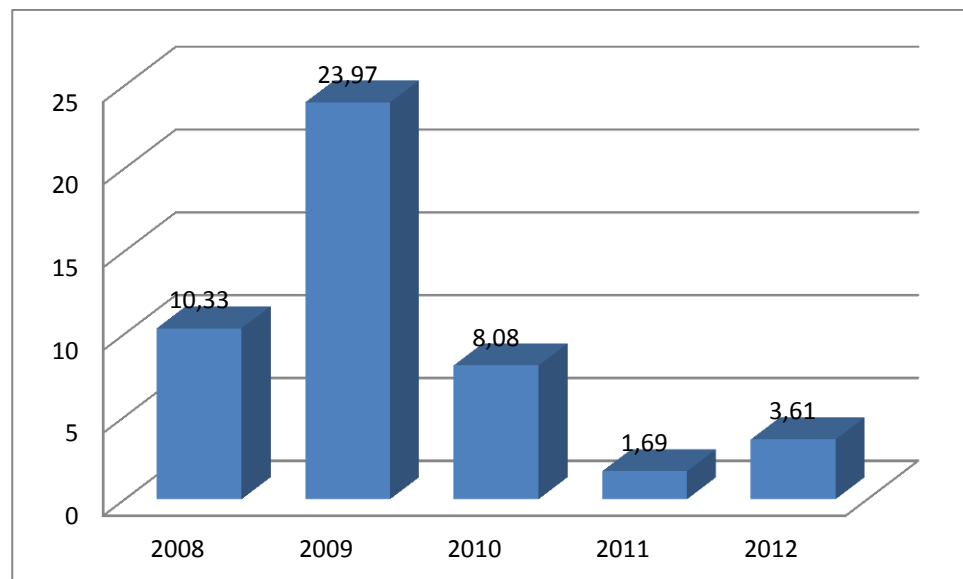
Tahun 2011 jumlah ibu melahirkan sebanyak 18.394 dengan jumlah bayi yang lahir sebanyak 18.413 anak. Pada tahun 2010 jumlah ibu melahirkan sebanyak 19.779 orang dengan bayi lahir sebanyak 19.827 anak, sedangkan tahun 2009 jumlah ibu melahirkan sebanyak 19.459 orang dengan bayi yang lahir sebanyak 19.334 anak. Jumlah ibu melahirkan hampir sama dengan tahun 2011 terjadi pada tahun 2008 sebesar 18.932 orang dengan jumlah bayi lahir 18.794 anak.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2008-2012 mengalami naik turun. Pada tahun 2008 Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan sebesar 3,93%. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian masyarakat pasca bencana gempa bumi. Pada tahun 2009 Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan sebesar 4,24%, untuk tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 % dari tahun 2009, dan pada tahun 2011 Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan sebesar 1,96%.

f. Inflasi

Pada tahun 2009 di Kabupaten Klaten mengalami tingkat inflasi tertinggi yaitu 23,97%. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,69%.



Gambar 3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012

Inflasi tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada bulan Desember sebesar 0,75%, sedang inflasi terendah sebesar -0,90% terjadi pada bulan Maret 2012. Kelompok inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Kelompok inflasi terendah pada kelompok bahan makanan.

2. Data Khusus

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berikut ini merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012:

Tabel 3. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah)

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	
2008	963.888.222.000	1.032.951.973.000	(69.063.751.000)
2009	973.128.063.000	1.035.249.426.000	(62.121.363.000)
2010	1.076.788.493.426	1.124.521.936.852	(47.733.443.426)
2011	1.345.233.534.000	1.419.359.631.000	(74.126.097.000)
2012	1.486.242.039.000	1.572.785.839.000	(86.543.800.000)

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 APBD Kabupaten Klaten lebih memperbanyak anggaran belanja dari pada anggaran pendapatan.

Tabel 4. Realisasi APBD Kabupaten Klaten 2008-2012 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi APBD		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	
2008	976.911.471.112	1.000.134.799.035	(23.223.327.923)
2009	984.534.437.004	981.121.677.296	3.412.759.708
2010	1.060.177.048.954	1.044.293.155.619	15.883.893.335
2011	1.364.124.811.662	1.316.714.038.098	47.410.773.564
2012	1.511.542.004.720	1.439.619.163.409	71.922.841.311

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengalami defisit sebesar Rp23.223.327.923,00 sedangkan pada tahun 2009-2012 mengalami surplus masing-masing sebesar Rp3.412.759.708,00, Rp15.883.893.335,00, Rp47.410.773.564,00, dan Rp71.922.841.311,00.

b. Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Tabel 5. Realisasi Pos-Pos Pembentuk Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2008	38.347.614.632	910.101.402.189	28.462.454.291
2009	46.603.876.930	922.915.374.294	15.015.185.780
2010	54.886.005.749	972.029.599.717	33.261.443.488
2011	72.290.993.848	1.145.206.557.368	146.627.260.446
2012	84.755.834.704	1.383.267.638.453	43.518.531.563
Total	296.884.325.863	5.333.520.572.021	266.884.875.568

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten

c. Pendapatan Bagian Laba BUMD

Pendapatan Bagian Laba BUMD adalah pos penyusun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. BUMD yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten antara lain : PDAM, Perusda Aneka Usaha, Perusda Bank Klaten, BKK, dan Bank Jateng.

Berikut ini merupakan tabel Pendapatan Bagian Laba BUMD Kabupaten Klaten tahun 2008-2012:

Tabel 6. Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD Kabupaten Klaten (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD	Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD
2008	2.659.000.000	1.972.866.515

Tahun	Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD	Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD
2009	3.000.000.000	1.974.940.070
2010	2.100.000.000	1.997.116.318
2011	6.111.000.000	3.796.358.337
2012	4.937.000.000	4.058.529.690
Total	18.807.000.000	13.799.810.930

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan total anggaran yang dibuat pemerintah daerah untuk laba BUMD sebesar Rp18.807.000.000,00, sedangkan untuk realisasi yang dapat diperoleh dari BUMD sebesar Rp13.799.810.930,00.

d. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berikut ini merupakan tabel Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012:

Tabel 7. Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Biaya pemerolehan Pajak Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah
2008	16.230.000.000	18.026.871.390	2.046.121.808
2009	20.464.500.000	18.921.063.434	3.201.191.022
2010	22.310.059.585	19.549.880.442	2.182.341.798
2011	25.467.000.000	28.261.724.817	3.733.699.953

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah
2012	26.525.000.000	30.472.348.079	3.048.242.000
Total	110.996.559.585	115.231.888.162	14.211.596.581

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten

Dari tabel 7 di atas menunjukkan total target penerimaan pajak Kabupaten Klaten sebesar Rp110.996.559.581,00. Pada lima tahun yang bersangkutan total realisasi pajak daerah mencapai Rp115.231.888.162,00. Memaknai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah perlu melihat data lain yang juga mempengaruhi realisasi tersebut yaitu Biaya Pemerolehan Pajak Daerah. Pada tabel di atas juga menunjukkan Biaya Pemerolehan Pajak Daerah sebesar Rp14.211.596.581,00.

e. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Klaten

Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan pos-pos penyusun belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut ini merupakan tabel Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Klaten tahun 2008-2012:

Tabel 8. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal
2008	854.309.519.194	144.478.226.483
2009	911.620.049.731	68.465.698.155
2010	1.003.208.396.799	40.141.788.238
2011	1.184.719.442.846	130.545.719.915
2012	1.256.462.923.385	182.607.367.867
Total	5.210.320.331.955	566.238.800.658

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten

Dari tabel 8 di atas menunjukkan jika realisasi belanja operasi lebih besar dari realisasi belanja modal pada semua tahun yang dibandingkan. Total realisasi belanja operasi dari lima tahun bersangkutan sebesar Rp5.210.320.331.955,00, sedangkan total realisasi belanja modal sebesar Rp566.238.800.658,00.

B. Perhitungan dan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten

Tahun 2008-2012

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2008-2012

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Kabupaten Klaten secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dikatakan baik, tetapi masih kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi dan terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta dalam pemungutan pajak daerah belum efisien.

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Berikut ini tabel perhitungan Varians Pendapatan Daerah:

Tabel 9. Analisis Varians Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan			
	APBD	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi APBD
2008	963.888.222.000	976.911.471.112	13.023.249.112	101,35%
2009	973.128.063.000	984.534.437.004	11.406.374.004	101,17%
2010	1.076.788.493.426	1.060.177.048.954	(16.611.444.472)	98,46%
2011	1.345.233.534.000	1.364.124.811.662	18.891.277.662	101,40%
2012	1.486.242.039.000	1.511.542.004.720	25.299.965.720	101,70%
Total	5.845.280.351.426	5.897.289.773.452	52.009.422.026	100,89%

Sumber: Data Diolah (2014)

Berdasarkan tabel 9 di atas dari kelima periode yang diteliti sebagian besar mengalami selisih yang diharapkan, hanya pada tahun 2010 mengalami selisih yang tidak diharapkan yaitu sebesar Rp16.611.444.472,00. Secara umum dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 100,89%. Persentase tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 101,70%, sedang persentase terendah pada tahun 2010 yaitu 98,46%.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

1) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008

Berikut ini merupakan hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2008:

Tabel 10. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2007	Realisasi Anggaran 2008	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	42.547.074.202	38.347.614.632	(4.199.459.570)	-9,87%
Pendapatan Transfer	825.137.326.407	910.101.402.189	84.964.075.782	10,30%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.074.844.041	28.462.454.291	22.387.610.250	368,53%
Total Pertumbuhan Pendapatan	873.759.244.650	976.911.471.112	103.152.226.462	11,81%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 10 di atas Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 9,87% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan 10,30% dari tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar 368,53%, jika dilihat dari Total Pertumbuhan Pendapatan, terdapat pertumbuhan secara positif sebesar 11,81%.

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2009

Berikut ini merupakan hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2009:

Tabel 11. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2008	Realisasi Anggaran 2009	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	38.347.614.632	46.603.876.930	8.256.262.298	21,53%
Pendapatan Transfer	910.101.402.189	922.915.374.294	12.813.972.105	1,41%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.462.454.291	15.015.185.780	(13.447.268.511)	-47,25%
Total Pertumbuhan Pendapatan	976.911.471.112	984.534.437.004	7.622.965.892	0,78%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 11 di atas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan positif masing-masing 21,53% dan 1,41% sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 47,25%. Secara umum Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 mengalami kenaikan positif yang ditunjukkan dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar positif 0,78%.

3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2010

Berikut ini merupakan hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2010:

Tabel 12. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2009	Realisasi Anggaran 2010	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	46.603.876.930	54.886.005.749	8.282.128.819	17,77%
Pendapatan Transfer	922.915.374.294	972.029.599.717	49.114.225.423	5,32%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.015.185.780	33.261.443.488	18.246.257.708	121,52%
Total Pertumbuhan Pendapatan	984.534.437.004	1.060.177.048.954	75.642.611.950	7,68%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 12 di atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhan positif masing-masing 17,77%, 5,32% dan 121,52%. Secara umum, Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2010 secara keseluruhan mengalami kenaikan positif yang ditunjukkan dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar positif 7,68%.

4) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011

Berikut ini merupakan hasil dari Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2011:

Tabel 13. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2010	Realisasi Anggaran 2011	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	54.886.005.749	72.290.993.848	17.404.988.099	31,71%
Pendapatan Transfer	972.029.599.717	1.145.206.557.368	173.176.957.651	17,82%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	33.261.443.488	146.627.260.446	113.365.816.958	340,83%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1.060.177.048.954	1.364.124.811.662	303.947.762.708	28,67%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 13 di atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhan positif masing-masing 31,71%, 17,82% dan 340,83%. Oleh karena itu, Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 secara keseluruhan mengalami kenaikan positif yang ditunjukkan dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar positif 28,67%.

5) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2012

Berikut ini merupakan hasil dari Analisis Pendapatan Daerah

Kabupaten Klaten pada tahun 2012:

Tabel 14. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2011	Realisasi Anggaran 2012	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	72.290.993.848	84.755.834.704	12.464.840.856	17,24%
Pendapatan Transfer	1.145.206.557.368	1.383.267.638.453	238.061.081.085	20,79%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	146.627.260.446	43.518.531.563	(103.108.728.883)	-70,32%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1.364.124.811.662	1.511.542.004.720	147.417.193.058	10,81%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 14 di atas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan positif masing-masing 17,24% dan 20,79% sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 70,32%. Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2012 secara keseluruhan mengalami kenaikan positif yang ditunjukkan dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar positif 10,81%.

6) Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2008-2012

Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 15. Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2008	873.759.244.650	976.911.471.112	103.152.226.462	11,81%
2009	976.911.471.112	984.534.437.004	7.622.965.892	0,78%
2010	984.534.437.004	1.060.177.048.954	75.642.611.950	7,68%
2011	1.060.177.048.954	1.364.124.811.662	303.947.762.708	28,67%
2012	1.364.124.811.662	1.511.542.004.720	147.417.193.058	10,81%
Total	5.259.507.013.382	5.897.289.773.452	637.782.760.070	12,13%

Sumber: Data diolah (2014)

Dari tabel perhitungan di atas, Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012 dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12,13%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 28,67% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,78%.

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Derajat Desentralisasi:

Tabel 16. Derajat Desentralisasi (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi (%)
2008	38.347.614.632	976.911.471.112	3,93%
2009	46.603.876.930	984.534.437.004	4,73%
2010	54.886.005.749	1.060.177.048.954	5,18%
2011	72.290.993.848	1.364.124.811.662	5,30%
2012	84.755.834.704	1.511.542.004.720	5,61%
Total	296.884.325.863	5.897.289.773.452	5,03%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 16 di atas dapat dikatakan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 rendah yang ditunjukkan dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 5,03%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 5,61%, sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 3,93%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Rasio

Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah:

Tabel 17. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2008	910.101.402.189	976.911.471.112	93,16%
2009	922.915.374.294	984.534.437.004	93,74%
2010	972.029.599.717	1.060.177.048.954	91,69%
2011	1.145.206.557.368	1.364.124.811.662	83,95%
2012	1.383.267.638.453	1.511.542.004.720	91,51%
Total	5.333.520.572.021	5.897.289.773.452	90,44%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 17 perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 90,44%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 93,74%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 83,95%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan propinsi.

3) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah. Rasio

Efektifitas Pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%, sedang Rasio Efisiensi Pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Berikut ini tabel perhitungan Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012:

Tabel 18. Rasio Efektifitas Pajak Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah
2008	18.026.871.390	16.230.000.000	111,07%
2009	18.921.063.434	20.464.500.000	92,46%
2010	19.549.880.442	22.310.059.585	87,63%
2011	28.261.724.817	25.467.000.000	110,97%
2012	30.472.348.079	26.525.000.000	114,88%
Total	115.231.88.162	110.996.559.585	103,82%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 18 di atas Rasio Efektifitas Pajak Daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100 persen. Pada tahun 2008 menunjukkan angka 111,07% berarti pada tahun ini penerimaan pajak daerah telah sesuai target yang dianggarkan. Lain halnya pada tahun 2009, pada tahun ini penerimaan daerah masih kurang baik karena dalam perbandingan antara penerimaan dan target menunjukkan angka 92,46% masih belum memenuhi syarat minimal 100%. Sama halnya dengan tahun 2010 belum maksimal juga penerimaan pajak daerah, ditunjukkan dengan persentase 87,65%. Pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan pajak daerah telah efektif dengan persentase terhadap target penerimaan sebesar 110,97% dan 114,88%. Jika dilihat secara umum, rata-rata rasio

efektivitas lima periode tersebut dapat dikatakan baik karena mencapai angka rata-rata sebesar 103,82%.

Tabel 19. Rasio Efisiensi Pajak Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah
2008	2.046.121.808	18.026.871.390	11,35%
2009	3.201.191.022	18.921.063.434	16,92%
2010	2.182.341.798	19.549.880.442	11,16%
2011	3.733.699.953	28.261.724.817	13,21%
2012	3.048.242.000	30.472.348.079	10,00%
Total	14.211.596.581	115.231.888.162	12,33%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 19 di atas Rasio Efisiensi Pajak Daerah dianggap baik apabila persentase kurang dari 10%. Pada tahun 2008 belum terjadi efisiensi untuk Kinerja Keuangan Daerah dalam pemungutan pajak, ini terlihat dari Rasio Efisiensi Pajak Daerah yang mencapai 11,35%. Pada tahun 2009 Rasio Efisiensi Pajak Daerah mengalami kenaikan menjadi 16,92%, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kurang baik. Sedangkan pada tahun 2010 Rasio Efisiensi Pajak Daerah hampir sama seperti tahun 2008 yaitu 11,16%, tetapi masih belum bisa dikatakan baik karena belum mendekati 10%. Pada tahun 2011 pemerintah daerah dalam melakukan pengumpulan pajak daerah belum efisien karena belum di bawah angka 10 % yaitu 13,21%. Pada tahun 2012 pemerintah daerah dalam melakukan pengumpulan pajak daerah belum efisien karena belum di bawah angka 10%. Secara umum, untuk Rasio Efisiensi

Pajak Daerah dapat dikatakan belum efisien. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata rasio ini mencapai 12,33%.

4) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tabel 20. Derajat Kontribusi BUMD (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Bagian Laba BUMD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Kontribusi BUMD
2008	1.972.866.515	976.911.471.112	0,20%
2009	1.974.940.070	984.534.437.004	0,20%
2010	1.997.116.318	1.060.177.048.954	0,19%
2011	3.796.358.337	1.364.124.811.662	0,28%
2012	4.058.529.690	1.511.542.004.720	0,27%
Total	13.799.810.930	5.897.289.773.452	0,23%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan perhitungan Derajat Kontribusi BUMD di atas menunjukkan bahwa kontribusi BUMD untuk pendapatan daerah secara umum mencapai angka 0,23%. Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,28%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 0,19%. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa Derajat Kontribusi BUMD setiap tahunnya lebih dari 0 %, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012

. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah pada Kabupaten Klaten secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Daerah dikatakan baik, tetapi belum ada keserasian belanja antara Belanja Operasi dan Belanja Modal.

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan).

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Varians Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012:

Tabel 21. Analisis Varians Belanja Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Belanja			Persentase Realisasi APBD
	APBD	Realisasi	Selisih	
2008	1.032.951.973.000	1.000.134.799.035	(32.817.173.965)	96,82%
2009	1.035.249.426.000	981.121.677.296	(54.127.748.704)	94,77%
2010	1.124.521.936.852	1.044.293.155.619	(80.228.781.233)	92,87%
2011	1.419.359.631.000	1.316.714.038.098	(102.645.592.902)	92,77%
2012	1.572.785.839.000	1.439.619.163.409	(133.166.675.591)	91,53%
Total	6.184.868.805.852	5.781.882.833.457	(402.985.972.395)	93,48%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 21, Analisis Varians Belanja Daerah selama tahun 2008-2012 terlihat realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja. Secara umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai 93,84%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 96,82%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 91,53%.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

1) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2008

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008:

Tabel 22. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	727.169.222.260	854.309.519.194	127.140.296.934	17,48%
Belanja Modal	138.749.673.852	144.478.226.483	5.728.552.631	4,13%
Belanja Tak Terduga	187.226.000	645.400.000	458.174.000	244,72%
Transfer	603.226.207	701.653.358	98.427.151	16,32%
Total Pertumbuhan Belanja	866.709.348.319	1.000.134.799.035	133.425.450.716	15,39%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 22 di atas Belanja Operasi dan Belanja Modal mengalami pertumbuhan positif yaitu 17,48% dan 4,13%. Terjadi pertumbuhan yang positif juga untuk Belanja Tak Terduga dan Transfer sebesar 244,72% dan 16,32% secara keseluruhan terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif sebesar 15,39%.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2009

Berikut ini tabel Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009:

Tabel 23. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	854.309.519.194	911.620.049.731	57.310.530.537	6,71%
Belanja Modal	144.478.226.483	68.465.698.155	(76.012.528.328)	-52,61%
Belanja Tak Terduga	645.400.000	726.801.800	81.401.800	12,61%
Transfer	701.653.358	309.127.610	(392.525.748)	-55,94%
Total Pertumbuhan Belanja	1.000.134.799.035	981.121.677.296	-19.013.121.739	-1,90%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 23 di atas Belanja Operasi mengalami pertumbuhan positif yaitu 6,71%. Belanja modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar 52,61%. Belanja Tak terduga juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,61%, sedangkan untuk Transfer mengalami pertumbuhan negatif sebesar 55,94%. Secara umum terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebesar 1,90% jika dibandingkan dengan tahun 2008.

3) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2010

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010:

Tabel 24. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	911.620.049.731	1.003.208.396.799	91.588.347.068	10,05%
Belanja Modal	68.465.698.155	40.141.788.238	(28.323.909.917)	-41,37%
Belanja Tak Terduga	726.801.800	539.120.000	(187.681.800)	-25,82%
Transfer	309.127.610	403.850.582	94.722.972	30,64%
Total Pertumbuhan Belanja	981.121.677.296	1.044.293.155.619	63.171.478.323	6,44%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 24 di atas Belanja Operasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,05%, sedangkan untuk Belanja Modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar 41,37%. Belanja tak Terduga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25,82% dan Transfer mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,64%. Secara keseluruhan terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,44% jika dibandingkan dengan tahun 2009.

4) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011:

Tabel 25. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2010	Realisasi 2011	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	1.003.208.396.799	1.184.719.442.846	181.511.046.047	18,09%
Belanja Modal	40.141.788.238	130.545.719.915	90.403.931.677	225,21%
Belanja Tak Terduga	539.120.000	1.007.843.900	468.723.900	86,94%
Transfer	403.850.582	441.031.437	37.180.855	9,21%
Total Pertumbuhan Belanja	1.044.293.155.619	1.316.714.038.098	272.420.882.479	26,09%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 25 di atas Belanja Operasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 18,09% dan untuk Belanja Modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 225,21%. Belanja Tak Terduga mengalami pertumbuhan positif sebesar 86,94% dan Transfer mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,21%. Secara keseluruhan terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 26,09% jika dibandingkan dengan tahun 2010.

5) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2012

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 :

Tabel 26. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	1.184.719.442.846	1.256.462.923.385	71.743.480.539	6,06%
Belanja Modal	130.545.719.915	182.607.367.867	52.061.647.952	39,88%
Belanja Tak Terduga	1.007.843.900	87.183.300	(920.660.600)	-91,35%
Transfer	441.031.437	461.688.857	20.657.420	4,68%
Total Pertumbuhan Belanja	1.316.714.038.098	1.439.619.163.409	122.905.125.311	9,33%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 26 di atas Belanja Operasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,06% dan untuk Belanja Modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 39,88%. Belanja Tak Terduga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 91,35% dan Transfer mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,68%. Secara keseluruhan terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,33% jika dibandingkan dengan tahun 2011.

6) Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2008-2012

Tabel 27. Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2008	866.709.348.319	1.000.134.799.035	133.425.450.716	15,39%
2009	1.000.134.799.035	981.121.677.296	(19.013.121.739)	-1,90%
2010	981.121.677.296	1.044.293.155.619	63.171.478.323	6,44%
2011	1.044.293.155.619	1.316.714.038.098	272.420.882.479	26,09%
2012	1.316.714.038.098	1.439.619.163.409	122.905.125.311	9,33%
Total	5.208.973.018.367	5.781.882.833.457	572.909.815.090	11%

Sumber: Data diolah (2014)

Dari tabel perhitungan di atas Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 26,09%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu - 1,90%.

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

1) Analisis KecerAsian Belanja Daerah Tahun 2008

Berikut ini tabel perhitungan Analisis KecerAsian Belanja Daerah Tahun 2008:

Tabel 28. Analisis KecerAsian Belanja Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2008	Total Belanja Daerah	KecerAsian Belanja
Belanja Operasi	854.309.519.194	1.000.134.799.035	85,42%
Belanja Pegawai	639.824.659.113	1.000.134.799.035	63,97%
Belanja Barang	106.548.559.177	1.000.134.799.035	10,65%
Belanja Hibah	356.624.350	1.000.134.799.035	0,04%
Belanja Bantuan Sosial	51.393.952.554	1.000.134.799.035	5,14%
Belanja Bantuan Keuangan	56.185.724.000	1.000.134.799.035	5,62%
Belanja Modal	144.478.226.483	1.000.134.799.035	14,45%
Belanja Tak Terduga	645.400.000	1.000.134.799.035	0,06%
Transfer	701.653.358	1.000.134.799.035	0,07%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2008 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 14,45% dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebesar 85,42%.

2) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2009

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2009:

Tabel 29. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2009	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	911.620.049.731	981.121.677.296	92,92%
Belanja Pegawai	693.011.043.538	981.121.677.296	70,63%
Belanja Barang	84.987.000.545	981.121.677.296	8,66%
Belanja Hibah	47.256.680.000	981.121.677.296	4,82%
Belanja Bantuan Sosial	38.198.674.348	981.121.677.296	3,89%
Belanja Bantuan Keuangan	48.166.651.300	981.121.677.296	4,91%
Belanja Modal	68.465.698.155	981.121.677.296	6,98%
Belanja Tak Terduga	726.801.800	981.121.677.296	0,07%
Transfer	309.127.610	981.121.677.296	0,03%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2009 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 6,98% dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebesar 92,92%.

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2010

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2010:

Tabel 30. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2010	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	1.003.208.396.799	1.044.293.155.619	96,07%
Belanja Pegawai	819.229.598.649	1.044.293.155.619	78,45%
Belanja Barang	89.587.909.599	1.044.293.155.619	8,58%
Belanja Bunga	1.000.822.381	1.044.293.155.619	0,10%
Belanja Hibah	17.293.045.998	1.044.293.155.619	1,66%
Belanja Bantuan Sosial	39.252.767.000	1.044.293.155.619	3,76%
Belanja Bantuan Keuangan	36.844.253.172	1.044.293.155.619	3,53%
Belanja Modal	40.141.788.238	1.044.293.155.619	3,84%
Belanja Tak Terduga	539.120.000	1.044.293.155.619	0,05%
Transfer	403.850.582	1.044.293.155.619	0,04%

Sumber: data diolah (2014)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2010 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 3,84%

dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebesar 96,07%.

4) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2011

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2011:

Tabel 31. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2011	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	1.184.719.442.846	1.316.714.038.098	89,98%
Belanja Pegawai	939.789.404.854	1.316.714.038.098	71,37%
Belanja Barang	159.316.744.492	1.316.714.038.098	12,10%
Belanja Bunga	26.966.652	1.316.714.038.098	0,002%
Belanja Hibah	9.388.473.000	1.316.714.038.098	0,71%
Belanja Bantuan Sosial	31.942.550.000	1.316.714.038.098	2,43%
Belanja Bantuan Keuangan	44.255.303.848	1.316.714.038.098	3,36%
Belanja Modal	130.545.719.915	1.316.714.038.098	9,91%
Belanja Tak Terduga	1.007.843.900	1.316.714.038.098	0,08%
Transfer	441.031.437	1.316.714.038.098	0,03%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2011 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 9,91%

dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebesar 89,98%.

5) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2012

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Keserasian Belanja

Daerah Tahun 2012:

Tabel 32. Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2012	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	1.256.462.923.385	1.439.619.163.409	87,28%
Belanja Pegawai	1.016.532.289.910	1.439.619.163.409	70,61%
Belanja Barang	152.049.761.621	1.439.619.163.409	10,56%
Belanja Bunga	259.928.554	1.439.619.163.409	0,02%
Belanja Hibah	9.926.338.000	1.439.619.163.409	0,69%
Belanja Bantuan Sosial	13.607.845.000	1.439.619.163.409	0,95%
Belanja Bantuan Keuangan	64.086.760.300	1.439.619.163.409	4,45%
Belanja Modal	182.607.367.867	1.439.619.163.409	12,68%
Belanja Tak Terduga	87.183.300	1.439.619.163.409	0,01%
Transfer	461.688.857	1.439.619.163.409	0,03%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2012 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 12,68% dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebesar 87,28%.

6) Analisis Trend Keserasian Belanja Daerah Tahun 2008-2012

Berikut ini tabel perhitungan Analisis Trend Keserasian Belanja

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012:

Tabel 33. Analisis Trend Belanja Operasi terhadap Total Belanja (dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Belanja Modal terhadap Total Belanja	Rasio Keserasian	
			Belanja Operasi	Belanja Modal
2008	854.309.519.194	144.478.226.483	85,42%	14,45%
	1.000.134.799.035	1.000.134.799.035		
2009	911.620.049.731	68.465.698.155	92,92%	6,98%
	981.121.677.296	981.121.677.296		
2010	1.003.208.396.799	40.141.788.238	96,07%	3,84%
	1.044.293.155.619	1.044.293.155.619		
2011	1.184.719.442.846	130.545.719.915	89,98%	9,91%
	1.316.714.038.098	1.316.714.038.098		
2012	1.256.462.923.385	182.607.367.867	87,28%	12,68%
	1.439.619.163.409	1.439.619.163.409		
Rata-rata			90,33%	9,57%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat terlihat bahwa selama tahun 2008-2012 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Selama tahun 2008-2012 rata-rata belanja operasi sebesar 90,33% sedangkan untuk belanja modal sebesar 9,57%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2010:164) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Berikut ini tabel perhitungan Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2008-2012.

1) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk Analisis

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008:

Tabel 34. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2008 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	880.595.833.700	854.309.519.194	97,01%
Belanja Pegawai	646.949.075.509	639.824.659.113	98,90%
Belanja Barang	119.097.350.191	106.548.559.177	89,46%
Belanja Hibah	659.674.000	356.624.350	54,06%
Belanja Bantuan Sosial	53.318.843.000	51.393.952.554	96,39%
Belanja Bantuan Keuangan	60.570.891.000	56.185.724.000	92,76%
Belanja Modal	149.928.438.3000	144.478.226.483	96,36%
Belanja Tanah	3.720.434.000	3.720.434.000	100,00%
Belanja Peralatan dan Mesin	28.915.695.150	27.692.460.725	95,77%
Belanja Bangunan dan Gedung	57.833.548.000	56.269.484.309	97,30%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56.387.506.000	53.917.607.999	95,62%
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.007.138.000	2.815.149.450	93,62%
Belanja Aset Lainnya	64.117.150	63.090.000	98,40%
Belanja Tak Terduga	1.460.426.000	645.400.000	44,19%
Transfer	967.275.000	701.653.358	72,54%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	967.275.000	701.653.358	72,54%
Bagi Hasil Pajak	460.940.000	331.052.055	71,82%
Bagi Hasil Retribusi	506.335.000	370.601.303	73,19%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 34 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer yang masing-masing memiliki rasio efisiensi sebesar 97,01%; 96,36%; 44,19%; dan 72,54%. Rasio ini masih di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2008.

2) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk Analisis

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009:

Tabel 35. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2009 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	958.531.475.000	911.620.049.731	95,11%
Belanja Pegawai	727.981.150.000	693.011.043.538	95,20%
Belanja Barang	94.704.076.000	84.987.000.545	89,74%
Belanja Hibah	47.271.680.000	356.624.350	0,75%
Belanja Bantuan Sosial	38.978.345.000	38.198.674.348	98%
Belanja Bantuan Keuangan	49.596.224.000	48.166.651.300	97,12%
Belanja Modal	75.194.885.000	68.465.698.155	91,05%
Belanja Tanah	0	0	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	13.145.356.000	12.682.026.855	96,48%
Belanja Bangunan dan Gedung	25.013.364.000	23.027.727.300	92,06%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.217.259.000	30.970.596.300	87,94%
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.723.406.000	1.690.397.700	98,08%
Belanja Aset Lainnya	95.500.000	94.950.000	99,42%
Belanja Tak Terduga	1.126.114.000	726.801.800	64,54%
Transfer	396.952.000	309.127.610	77,88%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	396.952.000	309.127.610	77,88%
Bagi Hasil Retribusi	396.952.000	309.127.610	77,88%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 35 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer yang masing-masing memiliki rasio efisiensi sebesar 95,11%; 91,05%; 64,54%; dan 77,78%. Rasio ini masih di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2009.

3) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk Analisis

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010:

Tabel 36. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2010 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	1.032.821.488.045	1.003.208.396.799	97,13%
Belanja Pegawai	833.505.079.000	819.229.598.649	98,29%
Belanja Barang	97.049.820.045	89.587.909.599	92,31%
Belanja Bunga	1.035.000.000	1.000.822.381	96,70%
Belanja Hibah	22.528.680.000	17.293.045.998	76,76%
Belanja Bantuan Sosial	39.808.324.000	39.252.767.000	98,60%
Belanja Bantuan Keuangan	38.894.585.000	36.844.253.172	94,73%
Belanja Modal	82.303.805.955	40.141.788.238	48,77%
Belanja Tanah	69.500.000	0	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	12.841.842.000	6.524.184.535	50,80%
Belanja Bangunan dan Gedung	19.238.834.500	17.901.840.247	93,05%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.976.845.455	15.233.753.606	95,35%
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.963.099.000	479.874.850	2,29%
Belanja Aset Lainnya	13.213.685.000	2.135.000	0,02%
Belanja Tak Terduga	8.852.642.852	539.120.000	6,09%
Transfer	544.000.000	403.850.582	74,24%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	544.000.000	403.850.582	74,24%
Bagi Hasil Retribusi	544.000.000	403.850.582	74,24%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 36 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer yang masing-masing memiliki rasio efisiensi sebesar 97,13%; 48,77%; 6,09%; dan 74,24%. Rasio ini masih di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2010.

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk Analisis

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011:

Tabel 37. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2011 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	1.242.024.523.000	1.184.719.442.846	95,39%
Belanja Pegawai	982.755.077.000	939.789.404.854	95,63%
Belanja Barang	168.747.885.000	159.316.744.492	94,41%
Belanja Bunga	515.625.000	26.966.625	5,23%
Belanja Hibah	9.430.151.000	9.388.473.000	99,56%
Belanja Bantuan Sosial	33.289.370.000	31.942.550.000	95,95%
Belanja Bantuan Keuangan	47.286.415.000	44.255.303.848	93,59%
Belanja Modal	174.494.708.000	130.545.719.915	74,81%
Belanja Tanah	0	0	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	34.779.357.000	18.382.092.816	52,85%
Belanja Bangunan dan Gedung	40.603.776.000	38.595.974.747	95,06%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	54.313.004.000	52.136.187.365	95,99%
Belanja Aset Tetap Lainnya	31.587.021.000	18.021.464.987	57,05%
Belanja Aset Lainnya	13.211.550.000	3.410.000.000	25,81%
Belanja Tak Terduga	2.266.400.000	1.007.843.900	44,47%
Transfer	574.000.000	441.031.437	76,83%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	574.000.000	441.031.437	76,83%
Bagi Hasil Retribusi	574.000.000	441.031.437	76,83%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 37 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer yang masing-masing memiliki rasio efisiensi sebesar 95,39%; 74,81%; 44,47%; dan 76,83%. Rasio ini masih di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Klaten telah mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2011.

5) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk Analisis

Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012:

Tabel 38. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2012 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	1.339.227.883.222	1.256.462.923.385	93,82%
Belanja Pegawai	1.068.381.803.240	1.016.532.289.910	95,15%
Belanja Barang	176.865.626.982	152.049.761.621	85,97%
Belanja Bunga	259.929.000	259.928.554	100,00%
Belanja Hibah	11.239.770.000	9.926.338.000	88,31%
Belanja Bantuan Sosial	15.812.165.000	13.607.845.000	86,06%
Belanja Bantuan Keuangan	66.668.580.000	64.086.760.300	96,13%
Belanja Modal	213.371.502.928	182.607.367.867	85,58%
Belanja Tanah	8.455.540.000	2.444.157.700	28,91%
Belanja Peralatan dan Mesin	41.196.543.775	37.876.841.356	91,94%
Belanja Bangunan dan Gedung	75.899.486.103	69.424.341.751	91,47%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66.878.084.650	62.364.946.705	93,25%
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.371.182.400	10.213.090.900	89,82%
Belanja Aset Lainnya	9.570.666.000	283.989.455	2,97%
Belanja Tak Terduga	19.612.452.850	87.183.300	0,44%
Transfer	574.000.000	461.688.857	80,43%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	574.000.000	461.688.857	80,43%
Bagi Hasil Retribusi	574.000.000	461.688.857	80,43%

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 38 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer yang masing-masing memiliki rasio efisiensi sebesar 93,82%; 85,58%; 0,44%; dan 80,43%. Rasio ini masih di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten telah mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2008.

6) Analisis Trend Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk Analisis Trend Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012:

Tabel 39. Analisis Trend Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2008	1.000.134.799.035	1.032.951.973.000	96,82%
2009	981.121.677.296	1.035.249.426.000	94,77%
2010	1.044.293.155.619	1.124.521.936.852	92,87%
2011	1.316.714.038.098	1.419.359.631.000	92,77%
2012	1.439.619.163.409	1.572.785.839.000	91,53%

Sumber: Data diolah (2014)

Dari tabel perhitungan di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2008-2012 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk lima tahun tersebut.

C. Pembahasan

Ringkasan hasil penelitian mengenai Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Klaten

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
A	Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah	
	1. Analisis Varians Pendapatan Daerah	100,89%
	2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah	12,13%
	3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah :	
	a. Derajat Desentralisasi	5,03%
	b. Rasio Ketergantungan Keuangan	90,44%
	c. Rasio Efektifitas Pajak	103,82%
	d. Rasio Efisiensi Pajak	12,33%
	e. Derajat Kontribusi BUMD	0,23%
B	Kinerja Keuangan Belanja Daerah	
	1. Analisis Varians Belanja	93,48%
	2. Analisis Pertumbuhan Belanja	11,00%
	3. Analisis Keserasian Belanja :	
	a. Rasio Belanja Operasi teradap Total Belanja	90,33%
	b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	9,57%
	4. Analisis Efisiensi Belanja	<100%

Sumber: Data diolah (2014)

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012 yang meliputi :

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan), sedangkan Kinerja Keuangan Pendapatan dinilai kurang baik jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) (Mahmudi, 2010). Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik. Ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih atau selisih yang diharapkan dan hanya tahun 2010 yang mengalami selisih kurang. Dikuatkan juga dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2008-2012 memiliki angka rata-rata sebesar 100,89%. Jika dilihat dari lima periode yang diteliti, maka persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai angka 101,7%, sedang persentase paling rendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 98,46%. Hasil Penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu Pemerintah Kabupaten dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan secara positif, sedang dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan secara negatif (Mahmudi, 2010). Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah secara umum Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12,13%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai angka 28,67%, sedang pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,78%. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:138) bahwa jika terjadi pertumbuhan yang positif maka menunjukkan terjadi peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan.

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah menunjukkan secara umum Kinerja Keuangan Pendapatan Kabupaten Klaten berdasarkan :

1) Derajat Desentralisasi

Artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011) menyebutkan jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Kabupaten Klaten menunjukkan angka rata-rata 5,03% sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 5,61%,

sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 3,93%. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:142) bahwa semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Artikel Kementerian Keuangan (2011) menjelaskan jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten menunjukkan angka rata-rata sebesar 90,44%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 93,74%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 83,95%. Angka di atas 50% memperlihatkan bahwa Kabupaten Klaten masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:142) bahwa semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat.

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, sedang Rasio Efisiensi Pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah pada tahun 2008, 2011, dan 2012 menunjukkan Pemerintah Kabupaten

Klaten telah melakukan efektivitas pajak, sedangkan tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Klaten belum efektif dalam penanganan pajak daerah. Secara umum Pemerintah Kabupaten Klaten menunjukkan angka rata-rata 103,82% untuk rasio efektivitas. Pemerintah daerah pada lima tahun ini belum efisien dalam pemungutan pajak karena secara umum Pemerintah Kabupaten Klaten menunjukkan angka rata-rata di atas 10% untuk rasio efisiensi. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengelola pajak daerah telah efektif tetapi belum efisien.

4) Derajat Kontribusi BUMD

Jika dilihat dari Derajat Kontribusi BUMD, perusahaan daerah dikatakan telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0%. Derajat Kontribusi BUMD Kabupaten Klaten menunjukkan angka rata-rata lebih dari 0% yaitu 0,23%. Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,28%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 0,19%. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki kontribusi terhadap besarnya pendapatan daerah Kabupaten Klaten.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, secara umum Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2008-2012 yang meliputi :

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Jika Analisis Varians Belanja Daerah terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Belanja dinilai baik (Mahmudi, 2010). Analisis Varians Belanja Daerah menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Keuangan Belanja Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2008-2012 yang mencapai angka rata-rata 9,48%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 96,82%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 91,53%. Hasil ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Kenaikan belanja daerah dikatakan wajar atau tidak perlu melihat inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, penyesuaian faktor makro ekonomi dan alasan kenaikan belanja terjadi,

apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 11%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 26,09%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu -1,90%.

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah umumnya menunjukkan bahwa proporsi Belanja Operasi mendominasi Total Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen dan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010). Analisis Keserasian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2008-2012 rata-rata belanja operasi sebesar 90,33% sedangkan untuk Belanja Modal sebesar 9,57%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:164) bahwa pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi Belanja Operasi yang tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatan rendah. Hasil ini juga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pendapatan tinggi.

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah daerah dinilai dari Analisis Efisiensi Belanja Daerah, dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Analisis Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2008-2012. Hal ini ditunjukkan dengan Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Klaten yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran.

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antar belanja.

D. Jawaban Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat menjawab keseluruhan dari pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2008-2012 yang mencapai angka rata-rata 100,89%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 101,7%, sedang persentase terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 98,46%.
2. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan positif yaitu 12,13%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai angka 28,67%, sedang pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,78%.
3. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah memiliki beberapa hasil. Berdasarkan Derajat Desentralisasi secara umum dapat dikatakan rendah. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata Derajat Desentralisasi mencapai 5,03%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 5,61%, sedang persentase terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 3,93%. Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, secara umum dapat dikatakan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata di atas 50% yaitu 90,44%. Tingkat

ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 93,74%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 83,95%. Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum dapat dikatakan efektif tetapi belum efisien. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata rasio mencapai 103,82% untuk efektivitas dan 12,33% untuk efisiensi. Persentase tertinggi untuk rasio efektivitas terjadi pada tahun 2012 yaitu 114,88% dan rasio efisiensi terjadi pada tahun 2009 yaitu 16,92%, sedang persentase terendah untuk rasio efektivitas terjadi pada tahun 2010 yaitu 92,46% dan rasio efisiensi terjadi pada tahun 2012 yaitu 10,00%. Berdasarkan Derajat Kontribusi BUMD, secara umum dapat dikatakan telah berkontribusi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata mencapai 0,23%. Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,28%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 0,19%.

4. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Varians Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi anggaran belanja Kabupaten Klaten sebesar 93,48%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 96,82%, sedang persentase terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 91,53%.
5. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata pertumbuhan mencapai 11%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 26,09%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu -1,90%.

6. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Keserasian Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen yang dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata sebesar 90,33% untuk Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan 9,57% untuk Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 96,07% dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 14,45%, sedangkan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 84,42% dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 3,84%.
7. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka di atas 100% atau tidak melebihi anggaran belanja.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu:

1. Periode penelitian yang singkat yaitu 2010-2012 sehingga menyebabkan sempitnya rentang waktu penelitian.
2. Penelitian ini dilakukan pada salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten.
3. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

- a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 100,89%.
- b. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 12,13%.
- c. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Klaten dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 5,03%. Dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan

Kabupaten Klaten selama 2008-2012 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih tergantung kepada pemerintah pusat ditunjukkan dengan angka ketergantungan mencapai 90,44%. Tingkat efektifitas pajak daerah mencapai angka rata-rata 103,82% , sehingga dikatakan efektif. Rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah mencapai angka di atas 10%, sehingga penggunaan biaya pemungutan pajak dikatakan belum efisien. BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten, ditunjukkan dengan Derajat Kontribusi BUMD yang setiap tahunnya lebih dari 0 %.

2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

- a. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Varians Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 93,48%.
- b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 11%.

- c. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2008-2012 rata-rata Belanja Operasi sebesar 90,33% sedang Belanja Modal sebesar 9,57%.
- d. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemkab Klaten

- a. Kabupaten Klaten perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Klaten. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.
- b. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintahan Kabupaten Klaten, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Kabupaten Klaten.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2008-2012. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemda Klaten.

- b. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arta Sadjarto. (2000). "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Universitas Kristen Petra.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2011). "Deskripsi dan Analisis APBD 2011". *Artikel*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mhd Karya Satya Azhar. (2008). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Nurlan Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Solopos. (2012). "Belanja Pegawai Presentase Belanja Pegawai di Klaten Nomor 1 di Jateng". Diambil dari <http://www.solopos.com/2012/04/12/belanja-pegawai-presentase-belanja-pegawai-di-klaten-nomor-1-di-jateng-177867> (Diakses pada tanggal 28 Januari 2014).
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Tyas Nurulafifah. (2012). "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Klaten
Tahun 2008-2012



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2008 DAN 2007

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2008	REALISASI 2008	(%)	REALISASI 2007
1	PENDAPATAN	963.888.222.000,00	976.911.471.112,00	101,35	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.910.145.000,00	38.347.614.632,00	87,33	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.230.000.000,00	18.026.871.390,00	111,07	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.192.655.000,00	10.463.290.219,00	85,82	0,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.784.000.000,00	3.324.071.598,00	57,47	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.703.490.000,00	6.533.381.425,00	67,33	0,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	894.926.303.000,00	910.101.402.189,00	101,70	0,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	842.188.504.000,00	851.604.340.823,00	101,12	0,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.817.874.000,00	43.143.610.781,00	127,58	0,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	895.850.000,00	985.949.042,00	110,06	0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	744.676.780.000,00	744.676.781.000,00	100,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	62.798.000.000,00	62.798.000.000,00	100,00	0,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	16.689.600.000,00	16.689.726.400,00	100,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	16.689.600.000,00	16.689.726.400,00	100,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	36.048.199.000,00	41.807.334.966,00	115,98	0,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.048.199.000,00	41.807.334.966,00	115,98	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	25.051.774.000,00	28.462.454.291,00	113,61	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	25.051.774.000,00	28.462.454.291,00	113,61	0,00
2	BELANJA	1.032.951.973.000,00	1.000.134.799.035,00	96,82	0,00
2.1	BELANJA OPERASI	880.595.833.700,00	854.309.519.194,00	97,01	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	646.949.075.509,00	639.824.659.113,00	98,90	0,00
2.1.2	Belanja Barang	119.097.350.191,00	106.548.559.177,00	89,46	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	659.674.000,00	356.624.350,00	54,06	0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	53.318.843.000,00	51.393.952.554,00	96,39	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	60.570.891.000,00	56.185.724.000,00	92,76	0,00
2.2	BELANJA MODAL	149.928.438.300,00	144.478.226.483,00	96,36	0,00
2.2.1	Belanja Tanah	3.720.434.000,00	3.720.434.000,00	100,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.915.695.150,00	27.692.460.725,00	95,77	0,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	57.833.548.000,00	56.269.484.309,00	97,30	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.387.506.000,00	53.917.607.999,00	95,62	0,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2008	REALISASI 2008	(%)	REALISASI 2007
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.007.138.000,00	2.815.149.450,00	93,62	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	64.117.150,00	63.090.000,00	98,40	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.460.426.000,00	645.400.000,00	44,19	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.460.426.000,00	645.400.000,00	44,19	0,00
2.4	TRANSFER	967.275.000,00	701.653.358,00	72,54	0,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	967.275.000,00	701.653.358,00	72,54	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	460.940.000,00	331.052.055,00	71,82	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	506.335.000,00	370.601.303,00	73,19	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.063.751.000,00)	(23.223.327.923,00)	33,63	0,00
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	73.222.751.000,00	65.108.397.426,00	88,92	0,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	64.700.202.000,00	64.700.202.829,00	100,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	408.194.597,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	8.522.549.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	4.159.000.000,00	4.159.000.000,00	100,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.159.000.000,00	1.159.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	69.063.751.000,00	60.949.397.426,00	88,25	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	37.726.069.503,00	0,00	0,00

Klaten, 1 Januari 2008

BUPATI KLATEN**H. SUNARNA, SE, M.Hum**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2009 DAN 2008

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2009	REALISASI 2009	(%)	REALISASI 2008
1	PENDAPATAN	973.128.063.000,00	984.534.437.004,00	101,17	72.873.700.442,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.073.046.000,00	46.603.876.930,00	70,53	37.020.980.324,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.464.500.000,00	18.921.063.434,00	92,46	18.026.871.390,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.400.488.000,00	11.034.755.597,00	88,99	2.716.718.869,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.481.000.000,00	4.101.047.114,00	74,82	1.972.866.515,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.727.058.000,00	12.547.010.785,00	45,25	14.304.523.550,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	892.253.658.000,00	922.915.374.294,00	103,44	35.852.720.118,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	844.921.919.000,00	841.073.104.734,00	99,54	35.852.720.118,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	40.540.842.000,00	38.281.761.514,00	94,43	35.852.720.118,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.193.815.000,00	4.604.081.220,00	74,33	0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	726.192.262.000,00	726.192.262.000,00	100,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	71.995.000.000,00	71.995.000.000,00	100,00	0,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.950.742.000,00	36.252.417.000,00	521,56	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	6.950.742.000,00	36.252.417.000,00	521,56	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	40.380.997.000,00	45.589.852.560,00	112,90	0,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.380.997.000,00	45.589.852.560,00	112,90	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.801.359.000,00	15.015.185.780,00	101,44	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	14.801.359.000,00	15.015.185.780,00	101,44	0,00
2	BELANJA	1.035.249.426.000,00	981.121.677.296,00	94,77	765.494.312.155,00
2.1	BELANJA OPERASI	958.531.475.000,00	911.620.049.731,00	95,11	649.754.179.031,00
2.1.1	Belanja Pegawai	727.981.150.000,00	693.011.043.538,00	95,20	568.348.822.231,00
2.1.2	Belanja Barang	94.704.076.000,00	84.987.000.545,00	89,74	81.405.356.800,00
2.1.5	Belanja Hibah	47.271.680.000,00	47.256.680.000,00	99,97	0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	38.978.345.000,00	38.198.674.348,00	98,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	49.596.224.000,00	48.166.651.300,00	97,12	0,00
2.2	BELANJA MODAL	75.194.885.000,00	68.465.698.155,00	91,05	115.740.133.124,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	2.967.959.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13.145.356.000,00	12.682.026.855,00	96,48	15.757.568.025,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	25.013.364.000,00	23.027.727.300,00	92,06	45.088.811.150,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.217.259.000,00	30.970.596.300,00	87,94	50.472.187.999,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.723.406.000,00	1.690.397.700,00	98,08	1.452.716.950,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	95.500.000,00	94.950.000,00	99,42	890.000,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2009	REALISASI 2009	(%)	REALISASI 2008
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.126.114.000,00	726.801.800,00	64,54	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.126.114.000,00	726.801.800,00	64,54	0,00
2.4	TRANSFER	396.952.000,00	309.127.610,00	77,88	0,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	396.952.000,00	309.127.610,00	77,88	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	396.952.000,00	309.127.610,00	77,88	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.121.363.000,00)	3.412.759.708,00	(5,49)	(692.620.611.713,00)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	62.621.363.000,00	57.594.345.860,00	91,97	408.194.597,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	37.726.069.000,00	37.726.069.503,00	100,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	22.450.000.000,00	17.464.964.500,00	77,79	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	147.560.000,00	0,00	408.194.597,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.445.294.000,00	1.255.751.857,00	51,35	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	500.000.000,00	497.479.000,00	99,50	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000,00	497.479.000,00	99,50	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	62.121.363.000,00	57.096.866.860,00	91,91	408.194.597,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	60.509.626.568,00	0,00	(692.212.417.116,00)

Klaten, 1 Januari 2009

BUPATI**SUNARNA**



KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2010 DAN 2009

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	(%)	REALISASI 2009
1	PENDAPATAN	1.076.788.493.426,00	1.060.177.048.954,00	98,46	984.684.437.004,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.743.899.426,00	54.886.005.749,00	88,89	46.603.876.930,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.310.059.585,00	19.549.880.442,00	87,63	18.921.063.434,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.490.000.000,00	14.764.846.356,00	89,54	11.034.755.597,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.081.000.000,00	3.995.347.524,00	78,63	4.101.047.114,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.862.839.841,00	16.575.931.427,00	92,80	12.547.010.785,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	976.362.105.000,00	972.029.599.717,00	99,56	922.915.374.294,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	850.195.048.000,00	845.975.281.673,00	99,50	841.073.104.734,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	45.857.181.000,00	37.793.208.804,00	82,42	38.281.761.514,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.561.102.000,00	11.405.307.869,00	150,84	4.604.081.220,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	726.234.465.000,00	726.234.465.000,00	100,00	726.192.262.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	70.542.300.000,00	70.542.300.000,00	100,00	71.995.000.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.786.060.000,00	85.787.035.600,00	100,00	36.252.417.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	85.786.060.000,00	85.337.035.600,00	99,48	36.252.417.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	40.380.997.000,00	40.267.282.444,00	99,72	45.589.852.560,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.380.997.000,00	40.267.282.444,00	99,72	45.589.852.560,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	38.682.489.000,00	33.261.443.488,00	85,99	15.165.185.780,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	30.682.489.000,00	31.261.443.488,00	101,89	15.165.185.780,00
2	BELANJA	1.124.521.936.852,00	1.044.293.155.619,00	92,87	980.554.772.260,00
2.1	BELANJA OPERASI	1.032.821.488.045,00	1.003.208.396.799,00	97,13	911.053.144.695,00
2.1.1	Belanja Pegawai	833.505.079.000,00	819.229.598.649,00	98,29	692.451.355.002,00
2.1.2	Belanja Barang	97.049.820.045,00	89.587.909.599,00	92,31	84.979.784.045,00
2.1.3	Belanja Bunga	1.035.000.000,00	1.000.822.381,00	96,70	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	22.528.680.000,00	17.293.045.998,00	76,76	47.256.680.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	39.808.324.000,00	39.252.767.000,00	98,60	38.198.674.348,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	38.894.585.000,00	36.844.253.172,00	94,73	48.166.651.300,00
2.2	BELANJA MODAL	82.303.805.955,00	40.141.788.238,00	48,77	68.465.698.155,00
2.2.1	Belanja Tanah	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.841.842.000,00	6.524.184.535,00	50,80	12.682.026.855,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	19.238.834.500,00	17.901.840.247,00	93,05	23.027.727.300,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	(%)	REALISASI 2009
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.976.845.455,00	15.233.753.606,00	95,35	30.970.596.300,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.963.099.000,00	479.874.850,00	2,29	1.690.397.700,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	13.213.685.000,00	2.135.000,00	0,02	94.950.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	8.852.642.852,00	539.120.000,00	6,09	726.801.800,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	8.852.642.852,00	539.120.000,00	6,09	726.801.800,00
2.4	TRANSFER	544.000.000,00	403.850.582,00	74,24	309.127.610,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	544.000.000,00	403.850.582,00	74,24	309.127.610,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	544.000.000,00	403.850.582,00	74,24	309.127.610,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.733.443.426,00)	15.883.893.335,00	(33,28)	4.129.664.744,00
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	73.198.443.426,00	66.374.255.188,00	90,68	57.594.345.860,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	67.048.615.057,00	60.509.626.568,00	90,25	37.726.069.503,00
3.1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	5.732.214.369,00	5.864.628.620,00	102,31	1.000.000.000,00
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	17.464.964.500,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	147.560.000,00
3.1.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	417.614.000,00	0,00	0,00	1.255.751.857,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	25.465.000.000,00	19.464.964.500,00	76,44	497.479.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	17.465.000.000,00	17.464.964.500,00	100,00	497.479.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.733.443.426,00	46.909.290.688,00	98,27	57.096.866.860,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	62.793.184.023,00	0,00	61.226.531.604,00

Klaten, 1 Januari 2010

BUPATI**SUNARNA, SE MHum**

Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Klaten

Nomor : 10 Tahun 2012

Tanggal : 29 Juni 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.345.233.534.000,00	1.364.124.811.662,00	18.891.277.662,00	101,40
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.580.476.000,00	72.290.993.848,00	710.517.848,00	100,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	25.467.000.000,00	28.261.724.817,00	2.794.724.817,00	110,97
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.675.976.000,00	15.532.736.612,00	(3.143.239.388,00)	83,17
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.111.000.000,00	3.796.358.337,00	(2.314.641.663,00)	62,12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.326.500.000,00	24.700.174.082,00	3.373.674.082,00	115,82
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.223.676.062.000,00	1.145.206.557.368,00	(78.469.504.632,00)	93,59
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	917.330.057.000,00	920.807.670.268,00	3.477.613.268,00	100,38
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.679.023.000,00	35.963.808.795,00	2.284.785.795,00	106,78
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.404.164.000,00	10.596.991.473,00	1.192.827.473,00	112,68
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	793.292.770.000,00	793.292.770.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	80.954.100.000,00	80.954.100.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	262.102.034.000,00	166.821.784.680,00	(95.280.249.320,00)	63,65
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	262.102.034.000,00	166.821.784.680,00	(95.280.249.320,00)	63,65
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	44.243.971.000,00	57.577.102.420,00	13.333.131.420,00	130,14
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.243.971.000,00	57.577.102.420,00	13.333.131.420,00	130,14
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	49.976.996.000,00	146.627.260.446,00	96.650.264.446,00	293,39
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	43.976.996.000,00	140.627.260.446,00	96.650.264.446,00	319,77
2	BELANJA	1.419.359.631.000,00	1.316.714.038.098,00	(102.645.592.902,00)	92,77
2.1	BELANJA OPERASI	1.242.024.523.000,00	1.184.719.442.846,00	(57.305.080.154,00)	95,39
2.1.1	Belanja Pegawai	982.755.077.000,00	939.789.404.854,00	(42.965.672.146,00)	95,63
2.1.2	Belanja Barang	168.747.885.000,00	159.316.744.492,00	(9.431.140.508,00)	94,41
2.1.3	Belanja Bunga	515.625.000,00	26.966.652,00	(488.658.348,00)	5,23
2.1.5	Belanja Hibah	9.430.151.000,00	9.388.473.000,00	(41.678.000,00)	99,56
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.289.379.000,00	31.942.550.000,00	(1.346.829.000,00)	95,95
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan	47.286.115.000,00	44.255.303.848,00	(3.031.111.152,00)	93,59

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	174.494.708.000,00	130.545.719.915,00	(43.948.988.085,00)	74,81
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	34.779.357.000,00	18.382.092.816,00	(16.397.264.184,00)	52,85
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	40.603.776.000,00	38.595.974.747,00	(2.007.801.253,00)	95,06
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.313.004.000,00	52.136.187.365,00	(2.176.816.635,00)	95,99
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	31.587.021.000,00	18.021.464.987,00	(13.565.556.013,00)	57,05
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	13.211.550.000,00	3.410.000.000,00	(9.801.550.000,00)	25,81
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.266.400.000,00	1.007.843.900,00	(1.258.556.100,00)	44,47
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.266.400.000,00	1.007.843.900,00	(1.258.556.100,00)	44,47
2.4	TRANSFER	574.000.000,00	441.031.437,00	(132.968.563,00)	76,83
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	574.000.000,00	441.031.437,00	(132.968.563,00)	76,83
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	574.000.000,00	441.031.437,00	(132.968.563,00)	76,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.126.097.000,00)	47.410.773.564,00	121.536.870.564,00	(63,96)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	84.071.097.000,00	65.262.561.308,00	(18.808.535.692,00)	77,63
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	62.793.184.000,00	62.793.184.023,00	23,00	100,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.750.000.000,00	0,00	(18.750.000.000,00)	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.527.913.000,00	2.469.377.285,00	(58.535.715,00)	97,68
3.2	PENGELUARAN DAERAH	9.945.000.000,00	9.945.000.000,00	0,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.945.000.000,00	7.945.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.126.097.000,00	55.317.561.308,00	(18.808.535.692,00)	74,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	102.728.334.872,00	102.728.334.872,00	0,00

Klaten, 29 Juni 2012

BUPATI

SUNARNA

Lampiran I PERDA PERTANGGUNJAWABAN

Nomor : 9 Tahun 2013

Tanggal : 2 Juli 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.486.242.039.000,00	1.511.542.004.720,00	25.299.965.720,00	101,70
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.185.112.000,00	84.755.834.704,00	7.570.722.704,00	109,81
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.525.000.000,00	30.472.348.079,00	3.947.348.079,00	114,88
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.793.012.000,00	19.209.149.223,00	(6.583.862.777,00)	74,47
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.937.000.000,00	4.058.529.690,00	(878.470.310,00)	82,21
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.930.100.000,00	31.015.807.712,00	11.085.707.712,00	155,62
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.358.361.896.000,00	1.383.267.638.453,00	24.905.742.453,00	101,83
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.089.555.795.000,00	1.098.162.417.447,00	8.606.622.447,00	100,79
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	37.370.290.000,00	43.675.339.813,00	6.305.049.813,00	116,87
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	10.399.146.000,00	12.700.718.634,00	2.301.572.634,00	122,13
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	967.284.829.000,00	967.284.829.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	74.501.530.000,00	74.501.530.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	207.721.763.000,00	207.721.763.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	207.721.763.000,00	207.721.763.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	61.084.338.000,00	77.383.458.006,00	16.299.120.006,00	126,68
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	61.084.338.000,00	77.383.458.006,00	16.299.120.006,00	126,68
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50.695.031.000,00	43.518.531.563,00	(7.176.499.437,00)	85,84
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.403.910.000,00	0,00	(6.403.910.000,00)	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	44.291.121.000,00	43.518.531.563,00	(772.589.437,00)	98,26
2	BELANJA	1.572.785.839.000,00	1.439.619.163.409,00	(133.166.675.591,00)	91,53
2.1	BELANJA OPERASI	1.339.227.883.222,00	1.256.462.923.385,00	(82.764.959.837,00)	93,82
2.1.1	Belanja Pegawai	1.068.381.803.240,00	1.016.532.289.910,00	(51.849.513.330,00)	95,15
2.1.2	Belanja Barang	176.865.626.982,00	152.049.761.621,00	(24.815.865.361,00)	85,97
2.1.3	Belanja Bunga	259.929.000,00	259.928.554,00	(446,00)	100,00
2.1.5	Belanja Hibah	11.239.770.000,00	9.926.338.000,00	(1.313.432.000,00)	88,31
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.812.165.000,00	13.607.845.000,00	(2.204.320.000,00)	86,06
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	66.668.589.000,00	64.086.760.300,00	(2.581.828.700,00)	96,13

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	213.371.502.928,00	182.607.367.867,00	(30.764.135.061,00)	85,58
2.2.1	Belanja Tanah	8.455.540.000,00	2.444.157.700,00	(6.011.382.300,00)	28,91
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.196.543.775,00	37.876.841.356,00	(3.319.702.419,00)	91,94
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	75.899.486.103,00	69.424.341.751,00	(6.475.144.352,00)	91,47
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.878.084.650,00	62.364.946.705,00	(4.513.137.945,00)	93,25
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.371.182.400,00	10.213.090.900,00	(1.158.091.500,00)	89,82
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	9.570.666.000,00	283.989.455,00	(9.286.676.545,00)	2,97
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	19.612.452.850,00	87.183.300,00	(19.525.269.550,00)	0,44
2.3.1	Belanja Tak Terduga	19.612.452.850,00	87.183.300,00	(19.525.269.550,00)	0,44
2.4	TRANSFER	574.000.000,00	461.688.857,00	(112.311.143,00)	80,43
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	574.000.000,00	461.688.857,00	(112.311.143,00)	80,43
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	574.000.000,00	461.688.857,00	(112.311.143,00)	80,43
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.543.800.000,00)	71.922.841.311,00	158.466.641.311,00	(83,11)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	113.514.995.000,00	113.514.995.872,00	872,00	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	113.514.995.000,00	113.514.995.872,00	872,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	26.971.195.000,00	20.910.193.841,00	(6.061.001.159,00)	77,53
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.491.000.000,00	3.430.000.000,00	(6.061.000.000,00)	36,14
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	11.480.195.000,00	11.480.193.841,00	(1.159,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.543.800.000,00	92.604.802.031,00	6.061.002.031,00	107,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	164.527.643.342,00	164.527.643.342,00	0,00

Klaten, 2 Juli 2013

BUPATI**SUNARNA**

Lampiran 2

**Perhitungan Dan Analisis Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2008-2012**

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2008-2012

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Tahun	Pendapatan			Presentase Realisasi APBD
	APBD	Realisasi	Selisih	
2008	963.888.222.000	976.911.471.112	13.023.249.112	101,35%
2009	973.128.063.000	984.534.437.004	11.406.374.004	101,17%
2010	1.076.788.493.426	1.060.177.048.954	(16.611.444.472)	98,46%
2011	1.345.233.534.000	1.364.124.811.662	18.891.277.662	101,40%
2012	1.486.242.039.000	1.511.542.004.720	25.299.965.720	101,70%
Total	5.845.280.351.426	5.897.289.773.452	52.009.422.026	100,89%

Sumber: Data diolah (2014)

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

1) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2008

Uraian	Realisasi 2007	Realisasi Anggaran 2008	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	42.547.074.202	38.347.614.632	(4.199.459.570)	-9,87%
Pendapatan Transfer	825.137.326.407	910.101.402.189	84.964.075.782	10,30%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.074.844.041	28.462.454.291	22.387.610.250	368,53%
Total Pertumbuhan Pendapatan	873.759.244.650	976.911.471.112	103.152.226.462	11,81%

Sumber: Data diolah (2014)

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2009

Uraian	Realisasi 2008	Realisasi Anggaran 2009	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	38.347.614.632	46.603.876.930	8.256.262.298	21,53%
Pendapatan Transfer	910.101.402.189	922.915.374.294	12.813.972.105	1,41%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.462.454.291	15.015.185.780	(13.447.268.511)	-47,25%
Total Pertumbuhan Pendapatan	976.911.471.112	984.534.437.004	7.622.965.892	0,78%

Sumber: data diolah (2014)

3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2010

Uraian	Realisasi 2009	Realisasi Anggaran 2010	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	46.603.876.930	54.886.005.749	8.282.128.819	17,77%
Pendapatan Transfer	922.915.374.294	972.029.599.717	49.114.225.423	5,32%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.015.185.780	33.261.443.488	18.246.257.708	121,52%
Total Pertumbuhan Pendapatan	984.534.437.004	1.060.177.048.954	75.642.611.950	7,68%

Sumber: data diolah (2014)

4) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011

Uraian	Realisasi 2010	Realisasi Anggaran 2011	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	54.886.005.749	72.290.993.848	17.404.988.099	31,71%
Pendapatan Transfer	972.029.599.717	1.145.206.557.368	173.176.957.651	17,82%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	33.261.443.488	146.627.260.446	113.365.816.958	340,83%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1.060.177.048.954	1.364.124.811.662	303.947.762.708	28,67%

Sumber: Data diolah (2014)

5) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2012

Uraian	Realisasi 2011	Realisasi Anggaran 2012	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	72.290.993.848	84.755.834.704	12.464.840.856	17,24%
Pendapatan Transfer	1.145.206.557.368	1.383.267.638.453	238.061.081.085	20,79%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	146.627.260.446	43.518.531.563	(103.108.728.883)	-70,32%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1.364.124.811.662	1.511.542.004.720	147.417.193.058	10,81%

Sumber: Data diolah (2014)

6) Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2008	873.759.244.650	976.911.471.112	103.152.226.462	11,81%
2009	976.911.471.112	984.534.437.004	7.622.965.892	0,78%
2010	984.534.437.004	1.060.177.048.954	75.642.611.950	7,68%
2011	1.060.177.048.954	1.364.124.811.662	303.947.762.708	28,67%
2012	1.364.124.811.662	1.511.542.004.720	147.417.193.058	10,81%
Total	5.259.507.013.382	5.897.289.773.452	637.782.760.070	12,13%

Sumber: Data diolah (2014)

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi (%)
2008	38.347.614.632	976.911.471.112	3,93%
2009	46.603.876.930	984.534.437.004	4,73%
2010	54.886.005.749	1.060.177.048.954	5,18%
2011	72.290.993.848	1.364.124.811.662	5,30%
2012	84.755.834.704	1.511.542.004.720	5,61%
Total	296.884.325.863	5.897.289.773.452	5,03%

Sumber: Data diolah (2014)

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2008	910.101.402.189	976.911.471.112	93,16%
2009	922.915.374.294	984.534.437.004	93,74%
2010	972.029.599.717	1.060.177.048.954	91,69%
2011	1.145.206.557.368	1.364.124.811.662	83,95%
2012	1.383.267.638.453	1.511.542.004.720	91,51%
Total	5.333.520.572.021	5.897.289.773.452	90,44%

Sumber: Data diolah (2014)

3) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah
2008	18.026.871.390	16.230.000.000	111,07%
2009	18.921.063.434	20.464.500.000	92,46%
2010	19.549.880.442	22.310.059.585	87,63%
2011	28.261.724.817	25.467.000.000	110,97%
2012	30.472.348.079	26.525.000.000	114,88%
Total	115.231.88.162	110.996.559.585	103,82%

Sumber: data diolah (2014)

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah
2008	2.046.121.808	18.026.871.390	11,35%
2009	3.201.191.022	18.921.063.434	16,92%
2010	2.182.341.798	19.549.880.442	11,16%
2011	3.733.699.953	28.261.724.817	13,21%
2012	3.048.242.000	30.472.348.079	10,00%
Total	14.211.596.581	115.231.888.162	12,33%

Sumber: Data diolah (2014)

4) Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Pendapatan Bagian Laba BUMD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Kontribusi BUMD
2008	1.972.866.515	976.911.471.112	0,20%
2009	1.974.940.070	984.534.437.004	0,20%
2010	1.997.116.318	1.060.177.048.954	0,19%
2011	3.796.358.337	1.364.124.811.662	0,28%
2012	4.058.529.690	1.511.542.004.720	0,27%
Total	13.799.810.930	5.897.289.773.452	0,23%

Sumber: Data diolah (2014)

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2008-2012

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Tahun	Belanja			Persentase Realisasi APBD
	APBD	Realisasi	Selisih	
2008	1.032.951.973.000	1.000.134.799.035	(32.817.173.965)	96,82%
2009	1.035.249.426.000	981.121.677.296	(54.127.748.704)	94,77%
2010	1.124.521.936.852	1.044.293.155.619	(80.228.781.233)	92,87%
2011	1.419.359.631.000	1.316.714.038.098	(102.645.592.902)	92,77%
2012	1.572.785.839.000	1.439.619.163.409	(133.166.675.591)	91,53%
Total	6.184.868.805.852	5.781.882.833.457	(402.985.972.395)	93,48%

Sumber: Data diolah (2014)

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

1) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2008

Uraian	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	727.169.222.260	854.309.519.194	127.140.296.934	17,48%
Belanja Modal	138.749.673.852	144.478.226.483	5.728.552.631	4,13%
Belanja Tak Terduga	187.226.000	645.400.000	458.174.000	244,72%
Transfer	603.226.207	701.653.358	98.427.151	16,32%
Total Pertumbuhan Belanja	866.709.348.319	1.000.134.799.035	133.425.450.716	15,39%

Sumber: Data diolah (2014)

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2009

Uraian	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	854.309.519.194	911.620.049.731	57.310.530.537	6,71%
Belanja Modal	144.478.226.483	68.465.698.155	(76.012.528.328)	-52,61%
Belanja Tak Terduga	645.400.000	726.801.800	81.401.800	12,61%
Transfer	701.653.358	309.127.610	(392.525.748)	-55,94%
Total Pertumbuhan Belanja	1.000.134.799.035	981.121.677.296	-19.013.121.739	-1,90%

Sumber: Data diolah (2014)

3) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2010

Uraian	Realisasi 2009	Realisasi 2010	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	911.620.049.731	1.003.208.396.799	91.588.347.068	10,05%
Belanja Modal	68.465.698.155	40.141.788.238	(28.323.909.917)	-41,37%
Belanja Tak Terduga	726.801.800	539.120.000	(187.681.800)	-25,82%
Transfer	309.127.610	403.850.582	94.722.972	30,64%
Total Pertumbuhan Belanja	981.121.677.296	1.044.293.155.619	63.171.478.323	6,44%

Sumber: Data diolah (20014)

4) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011

Uraian	Realisasi 2010	Realisasi 2011	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	1.003.208.396.799	1.184.719.442.846	181.511.046.047	18,09%
Belanja Modal	40.141.788.238	130.545.719.915	90.403.931.677	225,21%
Belanja Tak Terduga	539.120.000	1.007.843.900	468.723.900	86,94%
Transfer	403.850.582	441.031.437	37.180.855	9,21%
Total Pertumbuhan Belanja	1.044.293.155.619	1.316.714.038.098	272.420.882.479	26,09%

Sumber: Data diolah (2014)

5) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2012

Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Belanja Operasi	1.184.719.442.846	1.256.462.923.385	71.743.480.539	6,06%
Belanja Modal	130.545.719.915	182.607.367.867	52.061.647.952	39,88%
Belanja Tak Terduga	1.007.843.900	87.183.300	(920.660.600)	-91,35%
Transfer	441.031.437	461.688.857	20.657.420	4,68%
Total Pertumbuhan Belanja	1.316.714.038.098	1.439.619.163.409	122.905.125.311	9,33%

Sumber: Data diolah (2014)

6) Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2008	866.709.348.319	1.000.134.799.035	133.425.450.716	15,39%
2009	1.000.134.799.035	981.121.677.296	(19.013.121.739)	-1,90%
2010	981.121.677.296	1.044.293.155.619	63.171.478.323	6,44%
2011	1.044.293.155.619	1.316.714.038.098	272.420.882.479	26,09%
2012	1.316.714.038.098	1.439.619.163.409	122.905.125.311	9,33%
Total	5.208.973.018.367	5.781.882.833.457	572.909.815.090	11,00%

Sumber: Data diolah (2014)

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-
2012

1) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2008

Uraian	Realisasi 2008	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	854.309.519.194	1.000.134.799.035	85,42%
Belanja Pegawai	639.824.659.113	1.000.134.799.035	63,97%
Belanja Barang	106.548.559.177	1.000.134.799.035	10,65%
Belanja Hibah	356.624.350	1.000.134.799.035	0,04%
Belanja Bantuan Sosial	51.393.952.554	1.000.134.799.035	5,14%
Belanja Bantuan Keuangan	56.185.724.000	1.000.134.799.035	5,62%
Belanja Modal	144.478.226.483	1.000.134.799.035	14,45%
Belanja Tak Terduga	645.400.000	1.000.134.799.035	0,06%
Transfer	701.653.358	1.000.134.799.035	0,07%

Sumber: data diolah (2014)

2) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2009

Uraian	Realisasi 2009	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	911.620.049.731	981.121.677.296	92,92%
Belanja Pegawai	693.011.043.538	981.121.677.296	70,63%
Belanja Barang	84.987.000.545	981.121.677.296	8,66%
Belanja Hibah	47.256.680.000	981.121.677.296	4,82%
Belanja Bantuan Sosial	38.198.674.348	981.121.677.296	3,89%
Belanja Bantuan Keuangan	48.166.651.300	981.121.677.296	4,91%
Belanja Modal	68.465.698.155	981.121.677.296	6,98%
Belanja Tak Terduga	726.801.800	981.121.677.296	0,07%
Transfer	309.127.610	981.121.677.296	0,03%

Sumber: Data diolah (2014)

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2010

Uraian	Realisasi 2010	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	1.003.208.396.799	1.044.293.155.619	96,07%
Belanja Pegawai	819.229.598.649	1.044.293.155.619	78,45%
Belanja Barang	89.587.909.599	1.044.293.155.619	8,58%
Belanja Bunga	1.000.822.381	1.044.293.155.619	0,10%
Belanja Hibah	17.293.045.998	1.044.293.155.619	1,66%
Belanja Bantuan Sosial	39.252.767.000	1.044.293.155.619	3,76%
Belanja Bantuan Keuangan	36.844.253.172	1.044.293.155.619	3,53%
Belanja Modal	40.141.788.238	1.044.293.155.619	3,84%
Belanja Tak Terduga	539.120.000	1.044.293.155.619	0,05%
Transfer	403.850.582	1.044.293.155.619	0,04%

Sumber: Data diolah (2014)

4) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2011

Uraian	Realisasi 2011	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	1.184.719.442.846	1.316.714.038.098	89,98%
Belanja Pegawai	939.789.404.854	1.316.714.038.098	71,37%
Belanja Barang	159.316.744.492	1.316.714.038.098	12,10%
Belanja Bunga	26.966.652	1.316.714.038.098	0,002%
Belanja Hibah	9.388.473.000	1.316.714.038.098	0,71%
Belanja Bantuan Sosial	31.942.550.000	1.316.714.038.098	2,43%
Belanja Bantuan Keuangan	44.255.303.848	1.316.714.038.098	3,36%
Belanja Modal	130.545.719.915	1.316.714.038.098	9,91%
Belanja Tak Terduga	1.007.843.900	1.316.714.038.098	0,08%
Transfer	441.031.437	1.316.714.038.098	0,03%

Sumber: Data diolah (2014)

5) Analisis Keserasian Belanja Daerah Tahun 2012

Uraian	Realisasi 2012	Total Belanja Daerah	Keserasian Belanja
Belanja Operasi	1.256.462.923.385	1.439.619.163.409	87,28%
Belanja Pegawai	1.016.532.289.910	1.439.619.163.409	70,61%
Belanja Barang	152.049.761.621	1.439.619.163.409	10,56%
Belanja Bunga	259.928.554	1.439.619.163.409	0,02%
Belanja Hibah	9.926.338.000	1.439.619.163.409	0,69%
Belanja Bantuan Sosial	13.607.845.000	1.439.619.163.409	0,95%
Belanja Bantuan Keuangan	64.086.760.300	1.439.619.163.409	4,45%
Belanja Modal	182.607.367.867	1.439.619.163.409	12,68%
Belanja Tak Terduga	87.183.300	1.439.619.163.409	0,01%
Transfer	461.688.857	1.439.619.163.409	0,03%

Sumber: data diolah (2014)

6) Analisis Trend Keserasian Belanja Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	Rasio Keserasian	
			Belanja Operasi	Belanja Modal
2008	854.309.519.194	144.478.226.483	85,42%	14,45%
	1.000.134.799.035	1.000.134.799.035		
2009	911.620.049.731	68.465.698.155	92,92%	6,98%
	981.121.677.296	981.121.677.296		
2010	1.003.208.396.799	40.141.788.238	96,07%	3,84%
	1.044.293.155.619	1.044.293.155.619		
2011	1.184.719.442.846	130.545.719.915	89,98%	9,91%
	1.316.714.038.098	1.316.714.038.098		
2012	1.256.462.923.385	182.607.367.867	87,28%	12,68%
	1.439.619.163.409	1.439.619.163.409		
Rata-rata			90,33%	9,57%

Sumber: Data diolah (2014)

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

1) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	880.595.833.700	854.309.519.194	97,01%
Belanja Pegawai	646.949.075.509	639.824.659.113	98,90%
Belanja Barang	119.097.350.191	106.548.559.177	89,46%
Belanja Hibah	659.674.000	356.624.350	54,06%
Belanja Bantuan Sosial	53.318.843.000	51.393.952.554	96,39%
Belanja Bantuan Keuangan	60.570.891.000	56.185.724.000	92,76%
Belanja Modioal	149.928.438.3000	144.478.226.483	96,36%
Belanja Tanah	3.720.434.000	3.720.434.000	100,00%
Belanja Peralatan dan Mesin	28.915.695.150	27.692.460.725	95,77%
Belanja Bangunan dan Gedung	57.833.548.000	56.269.484.309	97,30%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56.387.506.000	53.917.607.999	95,62%
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.007.138.000	2.815.149.450	93,62%
Belanja Aset Lainnya	64.117.150	63.090.000	98,40%
Belanja Tak Terduga	1.460.426.000	645.400.000	44,19%
Transfer	967.275.000	701.653.358	72,54%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	967.275.000	701.653.358	72,54%
Bagi Hasil Pajak	460.940.000	331.052.055	71,82%
Bagi Hasil Retribusi	506.335.000	370.601.303	73,19%

Sumber: Data diolah (2014)

2) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	958.531.475.000	911.620.049.731	95,11%
Belanja Pegawai	727.981.150.000	693.011.043.538	95,20%
Belanja Barang	94.704.076.000	84.987.000.545	89,74%
Belanja Hibah	47.271.680.000	356.624.350	0,75%
Belanja Bantuan Sosial	38.978.345.000	38.198.674.348	98%
Belanja Bantuan Keuangan	49.596.224.000	48.166.651.300	97,12%
Belanja Modal	75.194.885.000	68.465.698.155	91,05%
Belanja Tanah	0	0	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	13.145.356.000	12.682.026.855	96,48%
Belanja Bangunan dan Gedung	25.013.364.000	23.027.727.300	92,06%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.217.259.000	30.970.596.300	87,94%
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.723.406.000	1.690.397.700	98,08%
Belanja Aset Lainnya	95.500.000	94.950.000	99,42%
Belanja Tak Terduga	1.126.114.000	726.801.800	64,54%
Transfer	396.952.000	309.127.610	77,88%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	396.952.000	309.127.610	77,88%
Bagi Hasil Retribusi	396.952.000	309.127.610	77,88%

Sumber: Data diolah (2014)

3) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	1.032.821.488.045	1.003.208.396.799	97,13%
Belanja Pegawai	833.505.079.000	819.229.598.649	98,29%
Belanja Barang	97.049.820.045	89.587.909.599	92,31%
Belanja Bunga	1.035.000.000	1.000.822.381	96,70%
Belanja Hibah	22.528.680.000	17.293.045.998	76,76%
Belanja Bantuan Sosial	39.808.324.000	39.252.767.000	98,60%
Belanja Bantuan Keuangan	38.894.585.000	36.844.253.172	94,73%
Belanja Modal	82.303.805.955	40.141.788.238	48,77%
Belanja Tanah	69.500.000	0	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	12.841.842.000	6.524.184.535	50,80%
Belanja Bangunan dan Gedung	19.238.834.500	17.901.840.247	93,05%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.976.845.455	15.233.753.606	95,35%
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.963.099.000	479.874.850	2,29%
Belanja Aset Lainnya	13.213.685.000	2.135.000	0,02%
Belanja Tak Terduga	8.852.642.852	539.120.000	6,09%
Transfer	544.000.000	403.850.582	74,24%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	544.000.000	403.850.582	74,24%
Bagi Hasil Retribusi	544.000.000	403.850.582	74,24%

Sumber: Data diolah (2014)

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	1.242.024.523.000	1.184.719.442.846	95,39%
Belanja Pegawai	982.755.077.000	939.789.404.854	95,63%
Belanja Barang	168.747.885.000	159.316.744.492	94,41%
Belanja Bunga	515.625.000	26.966.625	5,23%
Belanja Hibah	9.430.151.000	9.388.473.000	99,56%
Belanja Bantuan Sosial	33.289.370.000	31.942.550.000	95,95%
Belanja Bantuan Keuangan	47.286.415.000	44.255.303.848	93,59%
Belanja Modal	174.494.708.000	130.545.719.915	74,81%
Belanja Tanah	0	0	0%
Belanja Peralatan dan Mesin	34.779.357.000	18.382.092.816	52,85%
Belanja Bangunan dan Gedung	40.603.776.000	38.595.974.747	95,06%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	54.313.004.000	52.136.187.365	95,99%
Belanja Aset Tetap Lainnya	31.587.021.000	18.021.464.987	57,05%
Belanja Aset Lainnya	13.211.550.000	3.410.000.000	25,81%
Belanja Tak Terduga	2.266.400.000	1.007.843.900	44,47%
Transfer	574.000.000	441.031.437	76,83%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	574.000.000	441.031.437	76,83%
Bagi Hasil Retribusi	574.000.000	441.031.437	76,83%

Sumber: Data diolah (2014)

5) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi Belanja
Belanja Operasi	1.339.227.883.222	1.256.462.923.385	93,82%
Belanja Pegawai	1.068.381.803.240	1.016.532.289.910	95,15%
Belanja Barang	176.865.626.982	152.049.761.621	85,97%
Belanja Bunga	259.929.000	259.928.554	100,00%
Belanja Hibah	11.239.770.000	9.926.338.000	88,31%
Belanja Bantuan Sosial	15.812.165.000	13.607.845.000	86,06%
Belanja Bantuan Keuangan	66.668.580.000	64.086.760.300	96,13%
Belanja Modal	213.371.502.928	182.607.367.867	85,58%
Belanja Tanah	8.455.540.000	2.444.157.700	28,91%
Belanja Peralatan dan Mesin	41.196.543.775	37.876.841.356	91,94%
Belanja Bangunan dan Gedung	75.899.486.103	69.424.341.751	91,47%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66.878.084.650	62.364.946.705	93,25%
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.371.182.400	10.213.090.900	89,82%
Belanja Aset Lainnya	9.570.666.000	283.989.455	2,97%
Belanja Tak Terduga	19.612.452.850	87.183.300	0,44%
Transfer	574.000.000	461.688.857	80,43%
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/Desa	574.000.000	461.688.857	80,43%
Bagi Hasil Retribusi	574.000.000	461.688.857	80,43%

Sumber: data diolah (2014)

6) Analisis Trend Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2008-2012

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2008	1.000.134.799.035	1.032.951.973.000	96,82%
2009	981.121.677.296	1.035.249.426.000	94,77%
2010	1.044.293.155.619	1.124.521.936.852	92,87%
2011	1.316.714.038.098	1.419.359.631.000	92,77%
2012	1.439.619.163.409	1.572.785.839.000	91,53%

Sumber: Data diolah (2014)